

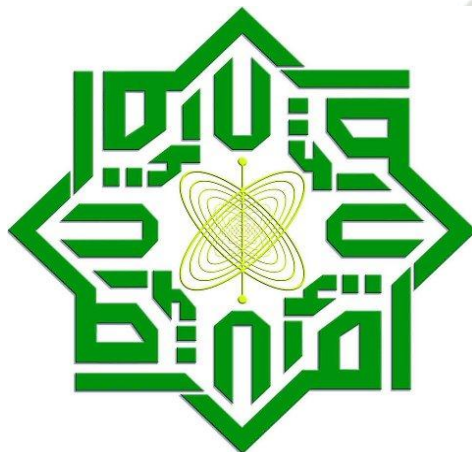


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SKRIPSI

# ANALISIS PENERAPAN SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

(Studi Kasus pada RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang)



UIN SUSKA RIAU

Di susun oleh :

**FITYAH NUR KUMALA**

**11573205268**

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
(BLUD)**

**(Studi Kasus pada RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**FITYAH NUR KUMALA**  
**11573205268**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : FITYAH NUR KUMALA  
 NIM : 11573205268  
 KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN  
 PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI  
 SEMESTER : IX(SEMBILAN)  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN  
 BERBASIS KINERJA DALAM  
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) (STUDI  
 KASUS PADA RSUD TENGKU SULUNG  
 PULAU KIJANG)

DISETUJUI OLEH  
 PEMBIMBING

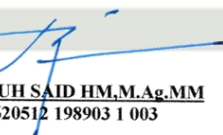
  
NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak.CA  
 NIP. 19780808 200710 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



  
DR. DRs. H. MUH SAID HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

  
NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak.CA  
 NIP. 19780808 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : FITYAH NUR KUMALA  
 NIM : 11573205268  
 KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN  
 PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI  
 SEMESTER : IX(SEMBILAN)  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS  
 KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
 JUDUL SKRIPSI : BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) (STUDI  
 KASUS PADA RSUD TENGKU SULUNG PULAU  
 KIJANG)  
 TANGGAL : SENIN, 04 NOVEMBER 2019

**DISETUJUI OLEH**

KETUA PENGUJI

**NASRULLAH NJAMIL, SE, M.Si, Ak.CA**  
 NIP. 19780808 200710 1 003

**MENGETAHUI**

PENGUJI I

**DR. MULIA SOSTADY, SE, MM, Ak**  
 NIP. 19761217 200901 1 014

PENGUJI II

**ARAS AIRA, SE, M.Ak**  
 NIP. 130411020

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

(STUDI KASUS PADA RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG)

OLEH

**FITYAH NUR KUMALA**

**11573205268**

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran 2018 di RSUD Tengku Sulung, untuk mengetahui bagaimana daya serap anggaran tahun 2018 di RSUD tengku sulung, dan bagaimana penyajian kode akun pada laporan realisasi anggaran di RSUD Tengku Sulung pada tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah RSUD Tengku Sulung yang terletak di Pulau Kijang kecamatan reteh kabupaten Inhil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan laporan realisasi anggaran tidak selaras dengan dokumen pelaksana anggaran, penyajian kode akun tidak selaras dengan catatan atas laporan keuangan dan terdapat beberapa kegiatan yang anggaran nya tidak terserap dengan baik. Kesalahan – kesalahan tersebut bisa menyebabkan kesalahpahaman bagi pengguna laporan yang ingin mendapatkan informasi tentang realisasi anggaran di RSUD Tengku sulung. Seharusnya pihak RSUD Tengku Sulung lebih teliti lagi dalam menyusun laporan realisasi anggaran, sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman lainnya.

**Kata kunci : Anggaran, anggaran berbasis kinerja, Badan layanan umum daerah (BLUD)**

UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin.* Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, serta shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Studi Kasus Pada RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang)**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program studi Akuntansi S1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, do'a, bimbingan serta dorongan, baik secara moral maupun spiritual kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kesempatan serta kemudahan dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.

Kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Zahid, dan Ibunda Khosingah yang telah memberikan doa disetiap sujud meminta yang terbaik kepada Allah untuk anak-anaknya, yang selalu memberikan kasih sayang yang sangat tulus serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga Malla dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Semoga Ayah dan Mamak selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Aamiin.

3. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus Pembimbing Skripsi dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberi arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.

Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak selaku Penasehat Akademik dari semester satu sampai dengan semester delapan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Eni Noviarni, SE, M.Si, Ak, CA selaku Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Bapak Ferizal Rachmad selaku Dosen Konsultasi Proposal Penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian proposal.

Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu selama saya menuntut ilmu pada almamater ini.

10. Biro administrasi, Staf dan Pegawai seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulis.

11. Mas ku Dzul Ilmi Nafi' S.Pd dan Adikku tercinta Dini Nur Sabila yang telah memberikan dukungan, Do'a dan semangat kepada Penulis. Serta Nenek dan Kakek ku tersayang, bulek-bulek ku , paman-paman ku, bude dan pakde yang selalu memberikan motivasi, Do'a, dukungan, bantuan dan nasihat , sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan baik. Semoga diberi Allah kemudahan dalam segala urusan.

12. Bapak dr. H. ISWANDI , Bapak Hendri S.Kep, Mbak Yuyun Widiasari, SE serta seluruh keluarga besar RSUD Tengku Sulung yang telah memberi kesempatan kepada penulis, sehingga penulis bisa melakukan penelitian di RSUD dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

13. Sahabat terbaik Yuliatin yang selalu ku panggil "Co", yang telah bersedia menjadi sahabat baik, dari jaman SD sampai dengan Kuliah di tempat yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama, sahabat terbaik yang bersedia mendengar segala keluh kesah penulis, memotivasi, menginspirasi dan mensupport penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dan menjadi sahabat baik dalam segala hal.

14. Adik-adikku Yeni Muttaqinah dan Nafida Nur Salsabila yang selalu memberikan semangat dan telah bersedia menjadi tempat bercerita segala hal, semoga langkah kalian di permudah oleh Allah.

15. Kakak-kakak ku, kakak Lathifah S.Pd, Paramitha Ariani S.Pd dan kakak Surya Agustina S.E yang selalu memberikan nasihat, motivasi, kekuatan dan semangat kepada penulis.

16. Herlina, Rusmiati, Oktaviani, Briggita Pricilla yang telah menjadi Besties terbaik penulis hingga saat ini yang tiada henti membantu, memotivasi, menasehati, menguatkan, menampung segala keluh dan kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Seluruh teman-teman Lokal A konsentrasi Akuntansi manajemen, Ana Deraswina Riyanti, Hasyanah Syafarani, Kurnia Armedi, Arif Rahmat Qusyairi, Riki Irawan, Riski Rismawati dan lainnya, serta teman-teman Akuntansi Lokal D yang sama-sama berjuang demi kesuksesan bersama dari semester satu sampai semester 5.

18. Keluarga Tanpa KK, Cici, lastri, jeki, fatimah, ririn, hendrizal, iftah, kamal, yoga, ulfa yang telah menjadi partner dalam kegiatan Kukerta di Desa Sekijang, Tapung Hilir, Kampar Provinsi Riau Angkatan 2018.

Terakhir, semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibalas kebbaikannya oleh Allah SWT dan mendapat Syafa'at Rasulullah SAW. Setiap lelah, keringat dan air mata tidak akan sia-sia dihari kebangkitan dan menjadi bukti atas menuntut ilmu karena Allah SWT. Kepada-Nya kita memohon ampunan dan memanjatkan do'a. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 23 Oktober 2019

Penulis

**FITYAH NUR KUMALA**

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Akuntansi .....	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi .....	10
2.2 Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.3 Sistem .....	11
2.3.1 Pengertian Sistem .....	11
2.3.2 Sistem Penyusunan Anggaran .....	12
2.4 Anggaran .....	13
2.4.1 Pengertian anggaran .....	13
2.4.2 Fungsi Anggaran .....	14
2.4.3 Siklus Anggaran .....	16
2.5 Kinerja .....	17
2.5.1 Pengertian Kinerja .....	17
2.6 Anggaran berbasis kinerja .....	21
2.6.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja .....	21

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja .....	22
2.6.3 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja .....	24
2.6.4 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja .....	24
2.6.5 Unsur-Unsur Anggaran Berbasis Kinerja .....	25
2.6.6 Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja .....	29
2.6.7 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja .....	31
2.7 Badan Layanan Umum Daerah.....	35
2.7.1 Pengertian Badan Layanan Umum Daerah .....	35
2.7.2 Perencanaan Dan Penganggaran .....	39
2.8 Pola Pengelolaan Keuangan (BLUD).....	46
2.8.1 Rencana Bisnis Dan Anggaran .....	41
2.9 Rumah Sakit .....	43
2.9.1 Pengertian Rumah Sakit .....	43
2.9.2 Fungsi Rumah Sakit .....	44
2.9.3 Pedoman Rumah Sakit .....	45
2.10 Akuntansi Dalam Pandangan Islam .....	45
2.11 Penelitian Terdahulu .....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM RSUD TENGGU SULUNG .....</b>	<b>54</b>
3.1 Profil RSUD Tengku Sulung.....	54
3.2 Organisasi dan Manajemen RSUD Tengku Sulung .....	57
3.3 Gambaran Umum RSUD Tengku Sulung .....	59
3.4 Jenis dan pendekatan penelitian .....	72
3.5 Analisis data .....	76
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>80</b>
4.1 Analisis terhadap realisaasi anggaran tahun 2018 pada RSUD Tengku Sulung .....	81
4.2 Analisa terhadap penyerapan anggaran RSUD Tengku Sulung .....	84
4.3 Analisa Terhadap penyajian laporan realisasi anggaran RSUD Tengku Sulung .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
5.1 Kesimpulan .....	102

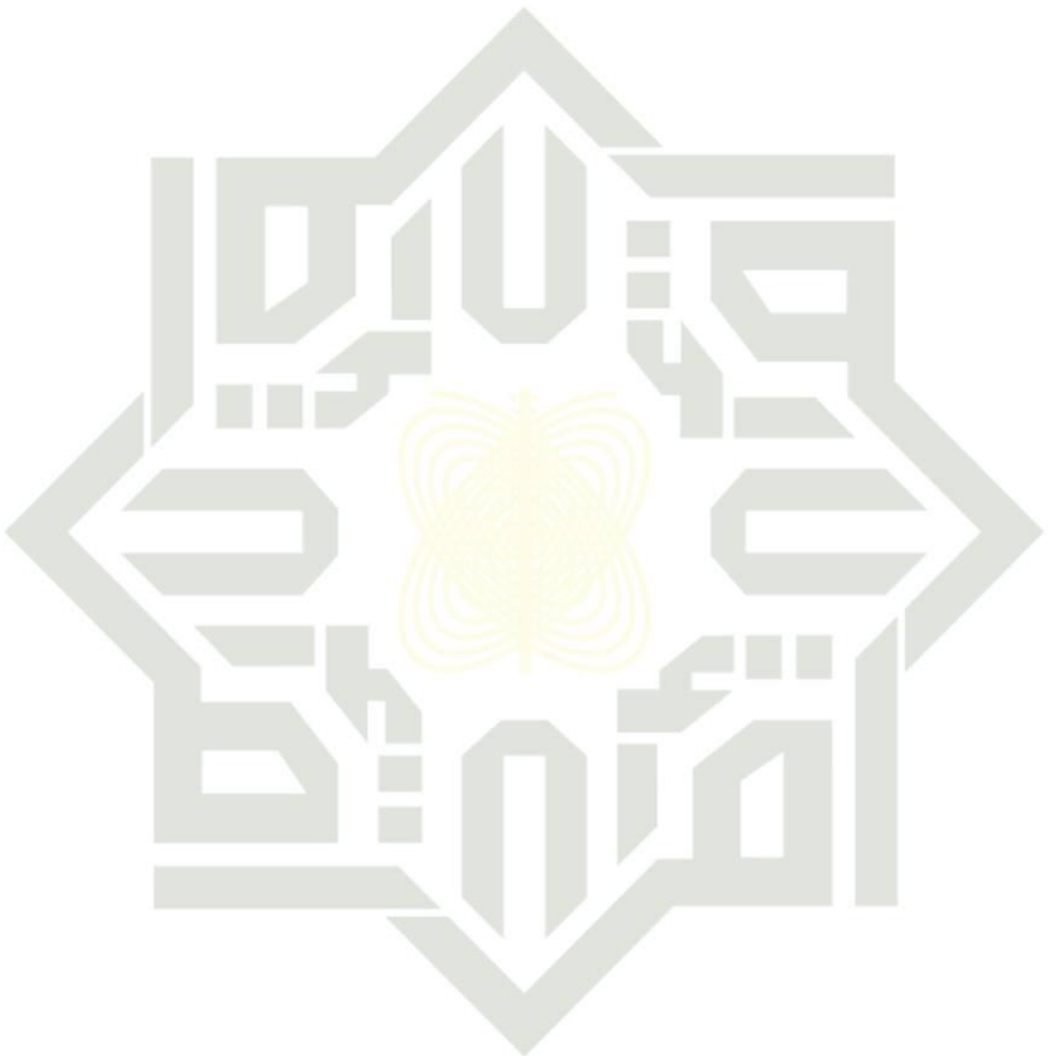
5.2 Saran .....	103
-----------------	-----

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	50
Tabel 3.1	sumber daya manusia RSUD Tengku Sulung .....	60
Tabel 3.2	sarana dan prasarana .....	64
Tabel 3.3	jumlah kunjungan pasien rawat jalan 2018 s/d juni 2019 .....	66
Tabel 3.4	jumlah kunjungan pasien rawat inap 2018 s/d juni 2019 .....	67
Tabel 3.5	tabel rawat inap 2018 .....	67
Tabel 3.6	indikator pelayanan RSUD tahun 2016-2018 .....	68
Tabel 3.7	indikator pelayanan RSUD 2015-2018 .....	69
Tabel 3.8	perincian cara bayar pasien .....	71
Tabel 3.9	perincian menurut jenis kasus .....	71
Tabel 3.10	perincian jenis kasus berdasarkan cara masuk pasien UGD .....	72
Tabel 4.1	ringkasan dokumen pelaksana anggaran .....	83
Tabel 4.2	laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja .....	84
Tabel 4.3	laporan realisasi anggaran .....	87
Tabel 4.4	kodefikasi akun pendapatan dan belanja.....	96

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi RSUD Tengku Sulung .....	58
Gambar 3.2 Gambaran Umum RSUD Tengku Sulung .....	59
Gambar 3.3 Foto bersama narasumber .....	79



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Literatur kontemporer tentang layanan publik banyak mengupas akan pentingnya perubahan paradigma manajemen layanan publik yang lebih berorientasi kepada pemenuhan ekspektasi warga negara sebagai konsumen. Dalam bidang layanan tertentu perlu di transformasikan bentuk organisasi publik yang lebih otonom dan fleksibel serta mengurangi rantai komando birokrasi yang kurang menekankan warga negara sebagai konsumen. Pinto (1998) menyebut bahwa pengembangan pelanggan/konsumen sebagai fokus utama dalam sektor publik untuk mencapai birokrasi yang lebih responsif menjadi isu utama di banyak negara dan tentu saja penyediaan barang dan jasa telah menjadi suatu yang kritis dalam reformasi (pelayanan publik) sekarang ini. Dalam kaitan pemenuhan ekspektasi konsumen (sebagai pengguna utama) tersebut, pemerintah mencoba melepaskan beberapa pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah dari organisasi birokrasi murni kepada pola unit organisasi pemerintah yang lebih otonom dan mandiri.

Ada suatu konsep yang bisa diterima secara umum bahwa pengertian pelayanan publik bisa dijabarkan sebagai pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau institusi-institusi lain atas nama pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu dalam UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik dapat di artikan sebagai “Kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa ataupun pelayanan administratif lainnya yang di selenggarakan oleh penyelenggaran pelayanan publik. Selanjutnya undang-undang tersebut memaparkan ruang lingkup pelayanan publik yang dapat digolongkan ke dalam 2 bentuk, yakni : (1). Pelayanan Barang dan Jasa Publik dan (2). Pelayanan Administratif. Dengan melihat kedua jenis fungsi layanan di atas serta ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan sejalan dengan reformasi keuangan negara dengan lahirnya UU no.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, serta adanya transformasi birokrasi dalam pelayanan publik, yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, maka satuan kerja pemerintah menyediakan pelayanan seperti Rumah Sakit dan beberapa pelayanan publik lainnya yang di sebut dengan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D).

Konsep layanan publik dalam bentuk layanan umum ini mulai di terapkan oleh pemerintah secara gradual , baik itu di level pemerintahan pusat ataupun pemerintah daerah yang di latarbelakangi oleh perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang berbasis kinerja pada tahun 2003-2004 dengan lahirnya beberapa paket Undang-undang yang menyangkut keuangan negara, seperti Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara, yang selanjutnya di atur oleh PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang di dalamnya mengatur secara lebih jelas tata kelola dan manajemen BLUD. Adapun tujuan utama di bentuknya BLU/D ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan tugas – tugas pemerintah pusat ataupun daerah.

BLU di harapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hingga tahun 2012 pelaksanaan badan layanan umum telah tersebar di berbagai daerah dan berbagai macam instansi, termasuk instansi yang mengurus masalah kesehatan masyarakat yaitu Rumah Sakit. Anggaran besar pun dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, pelaksanaan BLU sudah seharusnya memiliki konsep yang matang sebelum diterapkan di setiap instansi yang memiliki fokus kerja yang berbeda-beda, khususnya di rumah sakit.

Keberadaan Badan Layanan Umum menjadi sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik demi tercapainya efisiensi dan efektivitas. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang secara ringkas menekankan untuk adanya perubahan sistem anggaran tradisional menjadi Anggaran Berbasis Kinerja. Namun, dikarenakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja masih tergolong

baru dalam lingkup pemerintahan Indonesia, sistem tersebut masih perlu dipantau lebih jauh lagi, bagaimana praktiknya dan bagaimana hasil yang diberikan atas penerapan sistem tersebut. Rumah sakit sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam penyediaan layanan kesehatan juga dituntut untuk bertindak efektif dan efisien.

Terlebih lagi setelah rumah sakit tersebut berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, sehingga pengelolaan keuangan, khususnya pengelolaan anggaran, menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan. Sejalan dengan dibentuknya Badan Layanan Umum, disusunlah undang-undang yang khusus mengatur tentang anggaran BLU, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. Akan tetapi, dengan disusunnya dan diberlakukannya undang-undang tersebut belum dapat menjamin pelaksanaan anggaran yang bebas dari penyimpangan. Dikutip dari Mursitawati (2014) bahwa berdasarkan hasil temuan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan sampai tahun 2012 telah diputuskan oleh peradilan 38 kasus penyalahgunaan anggaran. Hal itu sudah menjadi bukti bahwa pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan sistem anggaran, dalam hal ini sistem Anggaran Berbasis Kinerja, masih sangat perlu untuk dilakukan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Sulung merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah tahun 2016. Hal ini memungkinkan rumah sakit tersebut untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Selain itu, RSUD Tengku Sulung juga diharuskan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai hasil dari proses penganggaran. PMK Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan bahwa RBA merupakan refleksi program dan kegiatan dari satuan kerja kementerian negara dan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RSUD Tengku Sulung telah menyandang status BLUD, sudah seharusnya menerapkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penggunaan sistem Anggaran Berbasis Kinerja.

Pada saat sebelum menyandang status BLUD, seluruh dana yang dituangkan dalam anggaran didapatkan dari pemerintah. RSUD Tengku Sulung hanya bertugas untuk ‘mengendalikan’ anggaran tersebut agar biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar atau lebih sedikit dari jumlah dana yang diperoleh. Akan tetapi, dengan disandangnya status BLUD, RSUD Tengku Sulung bukan lagi ‘mengendalikan’ melainkan ‘mengelola’-menyusun dan memperhitungkan anggaran yang bersumber dari pendapatan rumah sakit.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa masalah terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) pada RSUD Tengku Sulung.

1. Terdapat perbedaan antara dokumen pelaksana anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dan laporan realisasi anggaran pada tahun 2018. Perbedaan tersebut terletak pada akun belanja barang dan jasa dan akun

belanja modal. Pada Dokumen pelaksana anggaran, akun belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp. Rp.4.605.657.600, sedangkan pada laporan realisasi anggaran tercatat sebesar Rp. Rp.4.805.657.600, disini dapat di lihat terdapat selisih Rp.200.000.000,00 antara dokumen pelaksana anggaran dan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya hal tersebut juga terjadi pada akun belanja modal, di mana pada Dokumen pelaksana anggaran pada akun belanja modal tercatat sebesar Rp.2.622.460.598.06, sedangkan di realisasi anggaran tercatat sebesar Rp. 8.532.460.598,06. Terdapat selisih sebesar Rp. 5.910.000.000, setelah di lakukan analisis oleh peneliti, ditemukan belanja modal dengan pos akun belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum yang tidak termasuk kedalam dokumen pelaksana anggaran sebesar Rp. 5.910.000.000.

2. Terdapat minus anggaran pada akun belanja barang dan jasa dan kurangnya serapan anggaran pada pos tunjangan fungsional umum, dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi. Minus pagu anggaran terjadi pada akun belanja barang dan jasa BLUD, yang terealisasi sebesar 125%, berarti terjadi minus pagu anggaran sebesar 25%, kemudian kurangnya serapan anggaran terjadi pada pos tunjangan fungsional umum yang hanya terserap sebesar 59,67% dan pada pos tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi hanya terserap sebesar 44,35%.
3. Terdapat perbedaan kode akun pada laporan realisasi anggaran yang di sajikan dengan aturan yang telah di buat berdasarkan kode belanja daerah seperti yang telah tercatat pada catatan atas laporan keuangan, dimana seharusnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada laporan realisasi anggaran di sajikan dengan menggunakan kode akun belanja daerah seperti yang telah di tetapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan tersebut maka judul yang diangkat untuk skripsi ini adalah **“Analisis Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Studi Kasus pada RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang)”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana realisasi anggaran Tahun 2018 di RSUD Tengku Sulung ?
2. Bagaimana daya serap anggaran Tahun 2018 di RSUD Tengku sulung?
3. Bagaimana penyajian kode akun pada laporan realisasi anggaran RSUD Tengku Sulung ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran Tahun 2018 di RSUD Tengku Sulung
2. Untuk mengetahui bagaimana daya serap anggaran Tahun 2018 pada RSUD Tengku sulung.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyajian kode akun pada laporan realisasi anggaran RSUD Tengku Sulung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi pihak akademik :
  - a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya
  - b. Sebagai tambahan wacana akademik di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagi pihak organisasi
 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran apakah RSUD Tengku Sulung telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja sesuai dengan yang telah di tetapkan atau belum.

3. Bagi penulis
 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang telah di terapkan sewaktu kuliah, khususnya mengenai masalah analisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

4. Bagi pihak lain
 

Untuk membantu siapa saja yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang analisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dapat

di gunakan sebagai pengetahuan serta bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan di uraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaaat penelitian serta sistematika penulisan

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang teori-teori penunjang dan penelitian terdahulu yang sejenis sebagai acuan

#### **BAB III : Gambaran Umum RSUD Tengku Sulung**

Bab ini berisi tentang gambaran umum RSUD Tengku Sulung , letak geografis, profil RSUD , visi misi RSUD , struktur organisasi dan metodologi penelitian.

#### **BAB IV : Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran yang di harapkan bagi pihak yang berkepentingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntansi**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Mahmudi (2011:92) dalam Accounting Principles Board (APB) No.4 menyatakan, bahwa Akuntansi adalah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi yang kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang di maksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif). Pontoh (2013:2), menyatakan akuntansi pada dasarnya menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.

#### **2.2 Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Sujarweni (2015:1) menyatakan akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan di butuhkan



oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

## 2.3 Sistem

### 2.3.1 Pengertian Sistem

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2014 : 3) Sistem (*system*) adalah serangkaian dua tau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya, sekolah tinggi bisnis adalah sistem yang terdiri dari berbagai departemen, masing – masing merupakan subsistem. Selanjutnya, sekolah tinggi sendiri adalah subsistem dari universitas.

Menurut Diana Anastasia dan lilis Setiawati ( 2011: 3 ) Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk mencaapai tujuan. Tujuan dasar suatu sitem tergantung pada jenis sistem itu sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Isnaini (2016) menyatakan Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian atau sub-sub sistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk mengorganisasikan sistem informasi yang baru agar dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada suatu organisasi, serta memberikan pengertian mengenai suatu bentuk sistem yang ada pada suatu organisasi serta trik-trik manajemen yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis komputer .

### 2.3.2 Sistem penyusunan Anggaran

Liawan (2018) Anggaran di susun dengan berbagai sistem-sistem yang mempengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan-pendekatan tersebut, adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan ialah :

- a. *Traditional budget system* ( Sistem anggaran tradisional )
- b. *Performance budget system* (Anggaran berbasis kinerja)
- c. *Planning programming budget system*(PPBS)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.4 Anggaran****2.4.1 Pengertian Anggaran**

Menurut Hongren (2000) dalam Sasongko dan Parulian (2010:2) anggaran adalah *“budget is the quantitative exspression of a good proposed plan of action by management for a future time period and is an ald to the coordination and implementation of the plan”*. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Anggaran adalah ekspresi kuantitatif dari rencana tindakan yang di usulkan oleh manajemen untuk periode waktu mendatang dan merupakan tambahan bagi koordinasi dan implementasi rencana tersebut.

Menurut Freeman dan Shoulder (2003) dalam Nordiawan dan Hertianti (2010) mendefinisikan anggaran sebagai berikut . *budgeting is the process of allocating scarce resources to unlimited demand, and a budget is dollar and cents plan of operation for a specific period of time*. Dari definisi tersebut dapat di ketahui bahwa penganggaran adalah suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas. Sementara itu anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.

Kemudian beberapa definisi anggaran lainnya dalam Nanda dan Darwanis (2016) “Menurut GASB (Governmental Accounting Standards Board), Defenisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian,



2006:164), sedangkan menurut Halim (2007:164) anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Selanjutnya Mardiasmo (2009:61) menyebutkan bahwa anggaran merupakan estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun dan digunakan selama periode waktu tertentu.

#### 2.4.2 Fungsi Anggaran

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Berikut beberapa fungsi anggaran manajemen organisasi sektor publik menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:70).

##### a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang di buat.

##### b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.

##### c. Anggaran sebagai alat kebijakan

Arah atas kebijakan dapat di tentukan melalui anggaran organisasi sektor publik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, apakah berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang, tetapi lebih mungkin di capai”. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, dan jangan terlalu rendah sehingga mudah dicapai.

## 2.4.3 Siklus Anggaran

Pembuatan Anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Nordiawan dan Hertianti (2010:72) Pada organisasi sektor publik pembuatan anggaran umumnya melewati lima tahapan.

### a. Persiapan (*preparation*)

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian setiap unit di pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah di *review* dan diadakan dengar pendapat kesemua unit, anggaran ini akan di setujui oleh kepala pemerintahan.

### b. Persetujuan lembaga legislatif

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.

### c. Administrasi

Setelah anggaran di sahkan, pelaksanaan anggaran di mulai, baik pengumpulan pendapatan yang di tergetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah di rencanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan



ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

#### d. Pelaporan

Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

## 2.5. Kinerja

### 2.5.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan *performance*.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai: “ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu”. Sementara menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa: “Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja”. Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa: “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi/perusahaan”. Dalam bahasa Inggris istilah kinerja adalah *performance*. *Performance* merupakan kata benda. Salah satu entry-nya adalah “*thing done*” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Jadi arti *Performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut Mangkunegara (2001:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tinggi rendahnya kinerja pekerja berkaitan erat dengan sistem pemberian penghargaan yang diterapkan oleh lembaga/organisasi tempat mereka bekerja. Pemberian penghargaan yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja seseorang. (Rahadi, 2010:1-2)

Para ahli manajemen memberikan berbagai pengertian tentang kinerja ini sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing, dan bahkan juga berdasarkan pengalaman kerja yang langsung mereka alami dan rasakan. Diantara beberapa pengertian kinerja tersebut dalam Abdullah (2010:2-4) adalah :

- a. Wibowo menyebutkan kinerja itu berasal dari kata *performance* yang berarti hasil pekerjaan atau prestasi kerja. Namun perlu pula dipahami

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kinerja itu bukan sekedar hasil pekerjaan atau prestasi kerja, tetapi juga mencakup bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung.

- b. Wirawan menyebutkan kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah *performance*. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.
- c. Moeheriono menyebutkan kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.
- d. Amstrong dan Baron mendefinisikan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.
- e. Abdullah, dilihat dari asal katanya, kinerja itu adalah terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Dan dalam pengertian yang simpel kinerja adalah hasil dari pekerjaan organisasi, yang dikerjakan oleh karyawan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk (manual), arahan yang diberikan oleh pimpinan (manajer), kompetensi dan kemampuan karyawan mengembangkan nalarnya dalam bekerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (SDM) yang bekerja di institusi itu baik pemerintah maupun perusahaan (bisnis) untuk mencapai tujuan organisasi.

Moeheriono (2012:65) para pakar manajemen banyak memberikan pengertian tentang kinerja (*performance*) yaitu :

- a. Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
- b. Kinerja, adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
- c. Kinerja, adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang
- d. Kinerja, adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kinerja mengandung 2 komponen penting, yaitu :

1. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya.
2. Produktivitas kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja(*outcome*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.6 Anggaran Berbasis Kinerja****2.6.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut Sancoko, dkk (2008) prinsip anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanafaatannya. Menurut Halim dalam Damaianti (2014), mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. (Zuraidha, 2015)

Reza dan Darwanis (2016) menyebutkan bahwa Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sebuah sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang akan dicapai. Bastian (2006:171) menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2002:105) anggaran kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut

mencerminkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang berarti berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Halim (2007:177) dalam Reza dan Darwanis (2016) untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan ouput dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain outcome dari output tersebut. Output dan outcome tersebut dituangkan didalam target kinerja yang telah dibuat pada setiap unit kinerja. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai.

### 2.6.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Dalam penganggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip angaran berbasis kinerja. Prinsip anggaran berbasis menurut Halim (2007:178) dalam Reza dan Darwanis (2016) adalah sebagai berikut:

#### a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama seperti pemerintah untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tersebut.

b. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan dana pada setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

c. Keadilan Anggaran

Pemda wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi didalam pemberian pelayanan.

d. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan stakeholders.

e. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 2.6.3 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Robinson dan Last (2009:2) dalam Reza dan darwanis (2016) mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan pengeluaran publik dengan cara mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang akan dicapai melalui penggunaan informasi kinerja secara sistematis. Menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2005) tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk:

1. Mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai.
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal melaksanakan pengelolaan anggaran.

### 2.6.4 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Nordiawan (2006:79) dalam Reza dan Darwanis (2016) proses penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Penetapan Strategi Organisasi

Penetapan strategi organisasi merupakan cara pandang jauh kedepan yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang akan dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan

misi harus dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan strategi yang jelas kedepannya.

## 2. Pembuatan Tujuan

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam periode waktu satu tahun. Tujuan juga sering disebutkan sebagai turunan visi dan misi sari suatu organisasi.

## 3. Penetapan Aktifitas

Penetapan aktifitas merupakan hal yang mendasar dalam penyusunan anggaran, karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan.

## 4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan standar buku yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit kerja untuk membuat kriteria-kriteria dalam menentukan peringkatnya.

## 2.6.5 Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Reza dan darwanis (2016) menyatakan Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, terdapat unsur-unsur yang harus betul-betul dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur tersebut adalah pengeluaran pemerintah yang dikelompokkan menurut program dan kegiatan, pengukuran hasil kinerja, dan pelaporan program

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





(Bastian, 2006:176). Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:14), unsur-unsur dari anggaran berbasis kinerja yaitu :

#### 1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan juga menggunakan informasi untuk menentukan keefektifan dan keefisienan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. konsekuensi anggaran berbasis kinerja tersebut menghubungkan antara renstra dengan penganggaran.

##### a. Menentukan Program dan Kegiatan Dengan Jelas

Untuk mencapai tujuan strategis harus menentukan program dan kegiatan secara jelas. Pembiayaan dari masing-masing program dan kegiatan juga harus tergambar secara jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai adalah sistem akuntansi berbasis akrual.

##### b. Sistem Informasi Yang Memadai

Dalam mengukur kinerja yang baik diperlukan sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian hasil kerja dari masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan yaitu ekonomis, efektif dan efisien. Informasi yang dihasilkan harus dapat membandingkan antara kinerja yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan dengan kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan oleh setiap unit kerja yang kemudian dikontrol serta diverifikasi oleh instansi pusat maupun lembaga audit.

c. Pihak Eksternal

Agar tercapai penilaian yang adil diperlukan peran dari pihak eksternal dalam mengukur kinerja secara independen. Pendekatan dalam mengukur kinerja akan beragam antar unit kerja, tergantung bentuk keluaran yang akan dihasilkan.

d. Mengukur Kinerja Yang Strategis

Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang bersifat strategis, bukan menekankan pada tingkat yang menyeluruh dan bersifat birokratis.

2. Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment)

Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja sulit dicapai dengan maksimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu berupa penghargaan dan hukuman bagi para pelaksana anggaran. Penghargaan dan hukuman tersebut yaitu :

a. Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya.

Penerapan sistem insentif di organisasi sektor publik bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didukung oleh mekanisme bukan keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja. Hal ini dapat dijalankan jika ada aturan bahwa unit kerja yang mencapai kinerja dengan baik dapat memperoleh prioritas atas anggaran berikutnya walaupun alokasi anggaran telah ditentukan oleh program prioritas dan kebijakannya. Hal lain yang bisa dilakukan dalam pemberian insentif adalah berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam mencapai suatu target kerja yang ditetapkan. Apabila suatu lembaga dapat mencapai target kerja yang telah ditetapkan, maka mereka dapat diberikan keleluasaan yang lebih dalam mengelola anggaran yang dialokasikan.

b. Penerapan efisiensi

Penerapan efisiensi bisa dilakukan untuk program dan kegiatan yang bersifat pelayanan publik. pengalokasian anggaran untuk setiap program dan kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk saving dalam rangka meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada publik.

c. Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga

Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suatu bentuk perjanjian antara lembaga pusat dengan lembaga bersangkutan dalam pembagian atas hasil yang diterima.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Kontrak Kinerja

Apabila sistem anggaran berbasis kinerja telah berkembang dengan baik, maka kontrak kinerja dapat diterapkan. Atas nama pemerintah, Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja dengan kementerian/lembaga lainnya dan juga antara menteri dengan unit organisasi yang ada di bawahnya.

### 4. Kontrol Eksternal dan Internal

Kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh lembaga yang berada di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum mereka menggunakan anggarannya.

### 5. Pertanggungjawaban Manajemen

Jika sistem penganggaran tradisional menekankan pada kontrol input, maka sistem anggaran berbasis kinerja ditekankan pada output. Didalam sistem ini pengguna anggaran mendapat wewenang penuh dalam merencanakan dan mengelola anggarannya. Negara yang telah mengaplikasikan sistem ini adalah Australia, Inggris, New Zeland dan Swedia.

### 2.6.6 Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Ismail dan Idris (2009:102) dalam Reza dan Darwanis (2016), elemen elemen yang perlu diperhatikan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
2. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat dibandingkan antara biaya dengan prestasinya. Implementasi tentang anggaran berbasis kinerja adalah menyangkut dokumen anggaran, seperti RKA, pagu anggaran sementara, dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran).

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:10), elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Visi dan Misi. Visi merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam waktu jangka panjang. Sedangkan misi merupakan gambaran bagaimana visi tersebut akan dicapai.
2. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi. Tujuan digambarkan dalam RPJM nasional yang menunjukkan tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal.
3. Sasaran. Sasaran merupakan langkah langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan dapat membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Sasaran yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batasan waktu.

4. Program. Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran output dan outcome.
5. Kegiatan. Kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan untuk menghasilkan output dan outcome untuk pencapaian suatu program.

Output dan outcome merupakan prestasi kerja yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran suatu program. Output dan outcome didalam kegiatan satuan kerja harus sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan dimuat dalam dokumen renja tahunan dalam rangka penyusunan LAKIP (Ismail dan Idris, 2009:102).

#### 2.6.7 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Didalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk menyusun RAPBD berdasarkan prestasi kerja dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dalam pelaksanaanya. Menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) (2009:20) penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan Renstra. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian/lembaga terlebih dahulu harus mempunyai renstra. Substansi renstra memberikan gambaran tentang kemana tujuan organisasi itu dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut
2. Sinkronisasi. Sinkronisasi dimaksudkan untuk :
  - a. Menyusun alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap kebijakan yang mendasarinya.
  - b. Memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar akan dapat menghasilkan output yang mendukung pencapaian kinerja.
  - c. Memastikan bahwa kinerja suatu program akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
  - d. Memastikan keterkaitan antara program dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).
3. Penyusunan Kerangka Acuan.
 

Setiap usulan program dan kegiatannya harus dilengkapi dengan kerangka acuan yang menguraikan secara jelas bagaimana program dan kegiatannya terkait satu sama lain. Kerangka Acuan harus menggambarkan:

  - a. Uraian pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.

- b. Satuan kerja yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk mencapai output dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan tersebut.
  - c. Rincian pendekatan dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Uraian singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, serta uraian keterkaitan alur pemikiran antara kegiatan dengan program yang memayunginya.
  - d. Data sumber daya yang diperlukan, termasuk rincian perkiraan biayanya.
4. Penetapan Indikator Kinerja.

Indikator kinerja merupakan komitmen kinerja yang dijadikan sebagai dasar atau kriteria dari penilaian kinerja. Indikator kinerja memberikan penggambaran tentang apa yang akan diukur dan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ukuran penilaian berdasarkan pada indikator sebagai berikut :

- a. Masukan (input), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat pendanaan, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan lainlain yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- b. Keluaran (output), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan barang/jasa yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan input yang digunakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hasil (outcome), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang akan dicapai berdasarkan output program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - d. Manfaat (benefit), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat dan juga pemerintah.
  - e. Dampak (impact), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan implikasinya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat tersebut.
5. Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan juga kegagalan dalam pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
  6. Pelaporan Kinerja. Pertanggungjawaban kinerja dituangkan dalam LAKIP yang disusun secara jujur, objektif dan transparan. LAKIP menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

### 2.7.1 Pengertian badan layanan umum daerah (BLUD)

Terminologi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD mulai masuk ke ranah publik sejak kelahiran undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terutama pada Bab XII pasal 68-69 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satker/kantor pemerintah pusat dan daerah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. (Lukman, 2013:19)

Didalam peraturan pemerintah tersebut definisi BLU ditetapkan sebagai *“institusi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”*. Dalam hal tata kelola keuangan, selanjutnya PP tersebut menjabarkannya secara lebih jauh tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang diartikan sebagai *“pola pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.* (Lukman, 2013:20)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat 5 karakteristik khusus yang membedakan BLU/D dengan unit organisasi ataupun instansi pemerintah lainnya menurut Lukman (2013:20-25), yakni :

1. BLU/D adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan penyediaan barang dan jasa. Ini adalah karakter utama dari BLU/D. Instansi pemerintah bisa saja buakn penyedia barang atau jasa secara langsung kepada masyarakat, badan-badan usaha, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Namun instansi tersebut lebih diarahkan sebagai unit regulator atau pembuat kebijakan agar berjalannya aktivitas bisnis dan sosial masyarakat dengan lebih baik.
2. BLU/D harus menjalankan paraktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan pencarian keuntungan. Reformasi keuangan telah melahirkan sebuah paradigma baru yang diharapkan bisa mempercepat kemajuan kesejahteraan umum dengan pengurangan/pemisahan kewenangan unit pemerintahan yang membuat kebijakan layanan publik. Akan tetapi,walaupun BLU/D menerapkan menerapkan praktik bisnis ala korporasi, BLU/D tidak di perkenankan mencari keuntungan semata karena misi yang dicapai bukanlah berorientansi pada perusahaan saja, tetapi orientasinya lebih luas yaitu untuk memajukan kesejahteraan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, biaya yang di bebaskan kepada masyarakat di kontrol oleh pemerintah, sedangkan pihak lain pemerintah juga menyediakan anggaran untuk kelangsungan usaha BLU/D.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. BLU/D dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Aktivitas layanan BLU/D diselenggarakan menyerupai entitas bisnis yang tidak akan terlepas dalam pencapaian produktivitas yang tinggi dan efisien. Prinsip ini merupakan terbaru dan terpenting yang dilakukan dalam ranah manajemen publik dewasa ini dimana administrasi pemerintah biasa/tradisional lazimnya dikonotasikan sebagai unit/instansi yang boros, tambun dan lamban dengan produktivitas yang rendah. Dengan bertransformasinya instansi pemerintah ke dalam bentuk BLU/D yang dijalankan seperti entitas bisnis yang menganut manajemen dan praktik bisnis ala korporat, stigma negatif instansi negatif tersebut diharapkan akan dapat dihilangkan.
4. Adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU/D. Perubahan pola atau manajemen pada BLU/D yang semula dijalankan mengikuti praktik birokrasi kepada praktik bisnis menghendaki adanya aspek fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan keuangan BLU/D untuk menjamin kontinuitas dan pengembangan layanan terhadap masyarakat. Fleksibilitas BLU/D bisa di jabarkan dalam beberapa aspek, yaitu:
  - a) Fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan.
  - b) Fleksibilitas dalam pengelolaan Sumber daya manusia
  - c) Fleksibilitas dalam pengelolaan dan pengadaan aset/barang.



- d) BLU/D di kecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Ini merupakan prinsip yang luar biasa khusus pada BLU/D. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan BLU untuk sedikit “melenceng” dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pada umumnya. Sebagai contoh, menurut aturan yang berlaku, bagi instansi pemerintah pusat yang menerima dan mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) wajib menyetorkan dulu ke kas negara sebelum menggunakan PNBP tersebut, sebagaimana yang di amanatkan oleh UU No.20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak.

Namun demikian BLU mempunyai hak pengecualian dalam mengelola dan menggunakan PNBP yakni dapat digunakan secara langsung untuk kepentingan operasional dan bisnis BLU. Demikian halnya dengan BLUD yang dapat mempergunakan secara langsung sumber pendapatannya, termasuk ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lain, seperti ketentuan dalam pinjaman, piutang, pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah, dan lainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa BLU/D adalah satuan kerja/lembaga/instansi yang dimiliki pemerintah sebagaimana lembaga atau instansi pemerintah lainnya yang memberikan pelayanan. Namun demikian, walaupun BLU/D memberikan layanan kepada masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti unit / badan usaha milik negara ataupun swasta, tujuan usaha BLU/D tidaklah mengutamakan pencarian keuntungan semata, tetapi kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen.

## 2.7.2 Perencanaan dan Penganggaran

Waluyo (2011) menyatakan Perencanaan dan penganggaran meliputi rencana strategis bisnis dan pengintegrasian dalam RKA-K/L Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Rencana strategis bisnis merupakan istilah yang pengertiannya sama dengan Renstra bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis bisnis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Inpres tersebut, rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Penyusunan Anggaran BLUD yaitu dengan melakukan penyusunan RBA. RBA( Rencana Bisnis dan Anggaran ) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal (SPM), target kinerja dan anggaran BLUD. Penyusunan RBA dan Anggaran pada BLUD telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK. 05/2011 Tentang Rencana Bisinis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada BAB II Pasal II tentang Penyusunan RBA, Bahwa :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL).
- (2) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
  - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
  - c. basis akrual.
- (5) BLU yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut.
- (6) Dalam hal BLU belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, BLU menggunakan standar biaya umum.



- (7) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
  - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
  - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
  - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.
- (8) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.
- (9) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Negara/Lembaga.

## 2.8 Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU/BLUD

### 2.8.1 Rencana Bisnis dan Anggaran BLU/BLUD

Juliani (2018) menyatakan ada perbedaan antara instansi birokrasi/pemerintah biasa dengan BLU yakni hanya sebatas pada pengecualian terhadap tata cara pengelolaan keuangannya. Instansi pemerintah tunduk pada asas “universalitas” atau “universaliteit beginsel”,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan terhadap pengelolaan keuangan BLU tidak berlaku asas tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), sebagai berikut: “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.”

Pola Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD adalah dikecualikannya asas “universalitas” yang berlaku bagi APBN dan APBD, namun terhadap BLU/BLUD diterapkan manajemen perusahaan atau bisnis sehingga setiap BLU/BLUD pada awal tahun harus menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah disetujui oleh DPR/DPRD dan disahkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengecualian asas “universalitas” ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 69 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maupun dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Selanjutnya RBA-BLU atau RBA-BLUD sedikitnya mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLU atau BLUD, dimana Menteri Keuangan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan paling lambat tanggal 31 Desember menjelang akhir tahun anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan/PPKD sesuai dengan kewenangannya menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber APBN/APBD oleh BLU/BLUD. Dalam hal BLU/BLUD kekurangan anggaran, BLU/BLUD dapat mengajukan usulan tambahan dari APBN/APBD. Hal ini menunjukkan bahwa status BLU/BLUD masih tetap berada dalam lingkungan pemerintah, apalagi belanja BLU/BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kementerian negara/lembaga/SKPD/Pemerintah Daerah

## 2.9 Rumah Sakit

### 2.9.1 Pengertian Rumah Sakit

Siregar (2003 : 7) dalam miftah (2014) Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaa kesehatan. upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang di laksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan

## 2.9.2 Fungsi Rumah Sakit

Guna melaksanakan tugasnya, rumah sakit mempunyai berbagai fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik dan nonmedik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan dan asuhan keperawatan , pelayanan rujukan , pendidikan dan pelatihan , penelitian dan pengembangan, serta administrasi umum dan keuangan.

Menurut UU No.44 (2009:4) fungsi Rumah Sakit Adalah :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit .
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan etika ilmu pengetahuan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

### 2.9.3 Pedoman organisasi rumah sakit

Dalam Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman organisasi Rumah sakit pada pasal 2 di sebutkan bahwa Pengaturan pedoman organisasi Rumah Sakit bertujuan untuk mewujudkan organisasi Rumah Sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance). Dan dalam dalam pasal 6 disebutkan bahwa Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas:

- e. kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
- f. unsur pelayanan medis;
- g. unsur keperawatan;
- h. unsur penunjang medis;
- i. unsur administrasi umum dan keuangan;
- j. komite medis; dan
- k. satuan pemeriksaan internal.

### 2.10 Akuntansi dalam pandangan islam

Q.S Al-Baqarah ayat : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّضْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَاً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas berisi perintah praktik pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktik akuntansi, dan menegaskan adanya kewaspadaan dan pencegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi.

### Kinerja Dalam Pandangan Islam

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

*Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagimereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.* (Al-Ahqaf:19)

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Penelitian Terdahulu

Aliefiah Arief Zuraidha ( 2015 ) misalnya dalam Penelitiannya “Evaluasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Studi Kasus Pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan), ia mengevaluasi bagaimana penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil di Kabupaten Pasuruan sebagai objeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem Anggaran Berbasis Kinerja yang ideal belum tercapai, meskipun secara keseluruhan sudah baik. Ada beberapa hal yang belum dilaksanakan secara maksimal: 1) tahap penetapan indikator kinerja yaitu belum adanya indikator manfaat dan dampak pada setiap program/kegiatan yang disusun; 2) tahap penetapan standar biaya yaitu belum adanya Analisa Standar Belanja (ASB) sebagai acuan penyusunan anggaran; 3) tahap perhitungan anggaran yaitu secara garis besar perhitungan masih berdasarkan pada data-data historis dan taksiran yang logis; 4) tahap pertanggungjawaban yaitu belum disajikan laporan arus kas sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan BLUD. Kendala yang ditemukan selama implementasi yaitu belum adanya sistem akuntansi biaya sehingga perhitungan anggaran masih berdasarkan estimasi; dan kurangnya kemampuan SDM dalam memahami sistem Anggaran Berbasis Kinerja sehingga pelaksanaan sistem ini belum maksimal.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reza dan Darwanis (2016) telah melakukan Penelitian dengan judul Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan), hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan anggaran berbasis kinerja pada dinas DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tetapi meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat kendala kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga berpengaruh pada penilaian kinerja, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal meskipun sudah terwakili dan masih rendahnya tanggung jawab aparatur dinas untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

Penelitian Tika Sari Sandra Waworuntu (2013) “Evaluasi Penyusunan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen BLU RSUP Prof. DR. R.D. Kandou Manado” mengambil permasalahan bagaimana penyusunan anggaran dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen di rumah sakit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di Rumah Sakit Malalayang sebagai alat pengendalian manajemen sudah cukup efektif. Penyusunan anggaran yang digunakan menggunakan pendekatan sistem perencanaan, program, dan anggaran terpadu (PPBS). Hal ini terlihat dari bagaimana proses penyusunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





anggaran sampai dengan tahap pelaporannya sesuai dengan karakteristik PPBS yaitu pendekatan ini dirumuskan dalam bentuk program atau aktivitas dari visi, misi, dan tujuan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di Rumah Sakit Malalayang.

Penelitian yang dilakukan oleh Jullyana Said (2013) tentang “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Gorontalo” memunculkan permasalahan mengenai bagaimana evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Gorontalo dalam kaitannya dengan pencapaian antara pendapatan dan realisasi anggaran. Hasil yang didapat yakni pelaksanaan BLU dari tahun 2009-2010 belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya penunjang serta pemahaman unsur pimpinan pada unit-unit kerja masih relatif kurang.

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jullyana Said (2013)	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Gorontalo	Penelitian kualitatif dengan teknik analisis dokumen	Pelaksanaan BLU dari tahun 2009-2010 belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya penunjang serta pemahaman unsur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				pimpinan pada unit-unit kerja masih relatif kurang;
2.	Tika Sari Sandra Waworuntu (2013)	Evaluasi Penyusunan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen BLU RSUP Prof. DR. R.D. Kandou Manado	Penelitian deskriptif, yakni perbandingan antara teori, konsep, standar, atau arsip yang berlaku dengan praktek	Penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian manajemen berjalan secara efektif, karena disusun dari mulai perencanaannya sampai dengan tahap pelaporannya tersusun dengan baik.
3.	Aliefiah Arief Zuraidha (2015)	Evaluasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Studi Kasus Pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan)	Penelitian deskriptif, yakni perbandingan antara teori, konsep, standar, atau arsip yang berlaku dengan praktek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem Anggaran Berbasis Kinerja yang ideal belum tercapai, meskipun secara keseluruhan sudah baik. Ada beberapa hal yang belum dilaksanakan secara maksimal: 1. tahap penetapan indikator kinerja yaitu belum adanya indikator manfaat dan dampak pada setiap program/kegiatan yang disusun; 2. tahap penetapan standar biaya yaitu belum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				adanya Standar (ASB) acuan penyusunan anggaran	Analisa Belanja sebagai
				3. tahap perhitungan anggaran yaitu secara garis besar perhitungan masih berdasarkan pada data-data historis dan taksiran yang logis;	
				4. tahap pertanggungjawaban yaitu belum disajikan laporan arus kas sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan BLUD. Kendala yang ditemukan selama implementasi yaitu belum adanya sistem akuntansi biaya sehingga perhitungan anggaran masih berdasarkan estimasi; dan kurangnya kemampuan SDM dalam memahami sistem Anggaran Berbasis Kinerja sehingga pelaksanaan	



				sistem ini belum maksimal.
4.	Reza dan Darwanis (2016)	Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan)	Deskriptif analisis	Penerapan anggaran berbasis kinerja pada dinas DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tetapi meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat kendala kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga berpengaruh pada penilaian kinerja, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal meskipun sudah terwakili dan masih rendahnya tanggung jawab aparatur dinas untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

Sumber: Data diolah penulis, 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM RSUD TENGGU SULUNG

##### 3.1 Profi RSUD Tengku Sulung

##### 3.1.1 Profil RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

#### PROFIL RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

##### KECAMATAN RETEH TAHUN 2019

Nama Rumah Sakit	: RSUD Tengku Sulung
Alamat	: Jalan Penunjang Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri hilir Provinsi riau
Nomor telepon	: 08219280055
E-Mail	: <a href="mailto:rsudtengkusulung@gmail.com">rsudtengkusulung@gmail.com</a>
Pemilik	: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Nama Direktur	: Dr. H. ISWANDI
Status Kelembagaan	: SKPD
Kelas Rumah Sakit	: T ype D
Jumlah tempat tidur	: 32 buah

Tujuan Pembangunan Nasional adalah membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, yang memiliki kemampuan untuk kemandirian di segala bidang. Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu unsur dari sistem pembangunan nasional dimana pembangunan bidang kesehatan mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional. Seiring dengan pesatnya Pertumbuhan Pembangunan Nasional, Pembangunan

Bidang Kesehatan diarahkan pada Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan. Salah satunya yaitu meningkatkan jumlah sarana pelayanan kesehatan dan memperpendek jarak antara masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan.

Untuk itu pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama untuk meningkatkan baik mutu maupun jangkauan pelayan kesehatan bagi masyarakat terutama pelayanan kesehatan rujukan, hal inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk membangun RSUD pada wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Reteh. RSUD Tengku Sulung dibangun Pada tahun 2005, berupa 3 ( Tiga ) unit bangunan Fisik diatas tanah seluas dua hektar yang berasal dari Swadaya Masyarakat di Kecamatan Reteh, yang terletak di antara Parit 5 dan Parit 6 kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh

Pembangunan RSUD yang dimaksud adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan sebagai sarana rujukan pelayanan dasar, karena jangkauan wilayah Kecamatan Reteh untuk menuju ke pelayanan kesehatan rujukan (RSUD) ke Ibu Kota Kabupaten Tembilahan menempuh jarak yang jauh dan waktu yang cukup lama serta memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga bagi masyarakat dengan ekonomi rendah tidak bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Type D yang terletak di Pulau Kijang Kecamatan reteh, milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Di dirikan pada Tahun 2005. merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional kepada Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .

RSUD Tengku Sulung merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah dengan disahkannya peraturan daerah tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang dengan Perda ini maka rumah sakit menjadi unsur Lembaga Teknik Daerah (LTD) dalam bidang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang dan bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Daerah TK II Kabupaten Indragiri Hilir

Pada Tanggal Pada Tanggal 22 Maret 2011 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.05/I/860/11 maka Rumah sakit Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang ditetapkan statusnya menjadi Rumah sakit Tipe D. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang dikeluarkan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 02/SIORS/PPSDK-IV/2011/873 pada tanggal 29 April 2011

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.2 Organisasi dan Manajemen RSUD Tengku Sulung

Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung adalah Rumah Sakit dengan Klasifikasi Kelas D milik Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dengan Jumlah tempat tidur 32 buah.

#### 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung

Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah tipe C yang terakreditasi paripurna pada tahun 2023 dan menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat di bagian inhil selatan

#### 2. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung :

- a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Indragiri hilir bagian selatan
- b. Terwujudnya pelayanan administrasi rumah sakit yang optimal dan akuntabel

#### 3. Falsafah dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung

##### 1. Falsafah

“Memberikan pelayanan kesehatan secara tepat, ramah oleh tenaga profesional“

##### 2. Motto

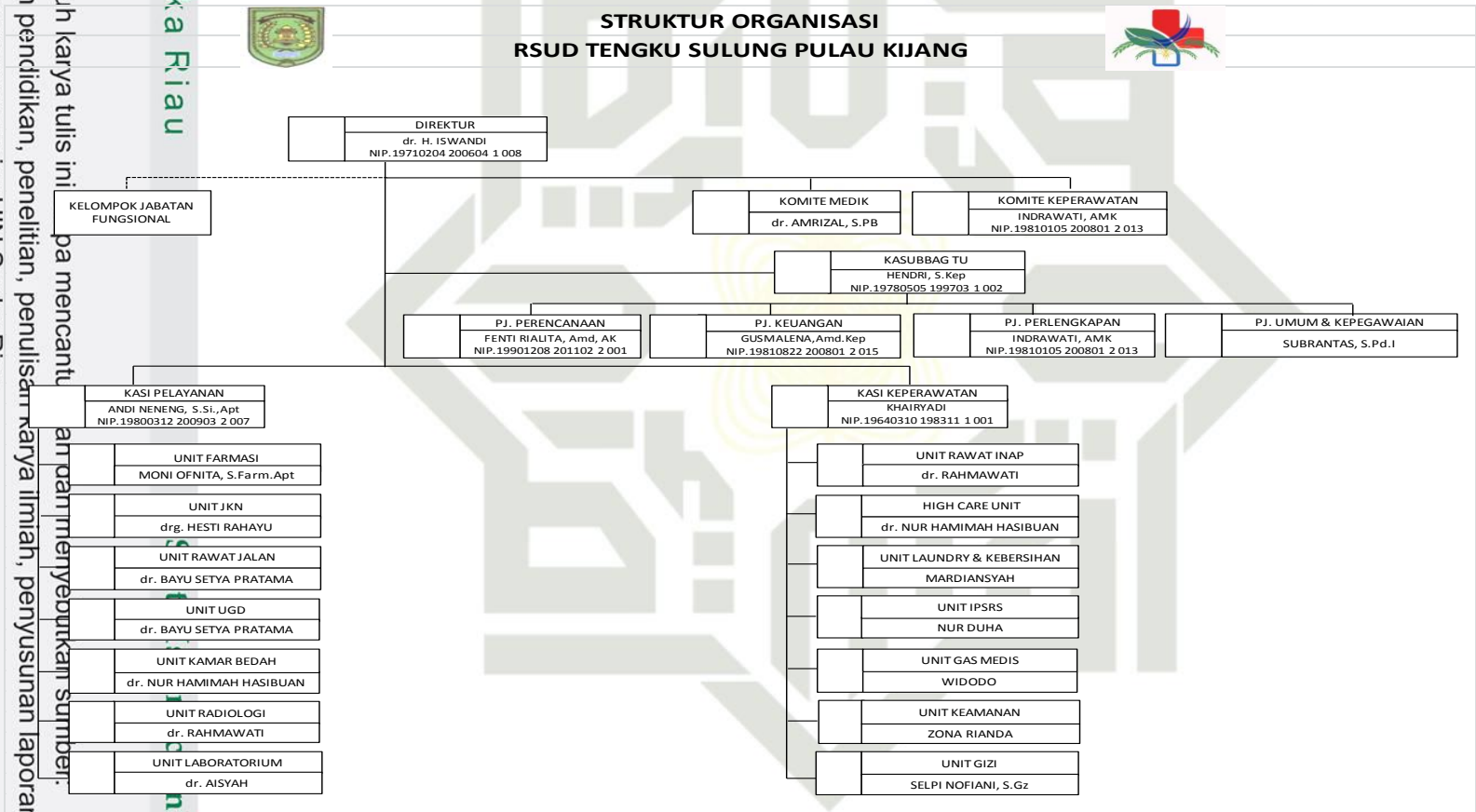
“ Senyum, Sapa, Ramah, Tanggap “

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# Struktur Organisasi RSUD Tengku Sulung

GAMBAR 3.1



Sumber : RSUD Tengku Sulung



### 4.3 Gambaran Umum RSUD TENGKU SULUNG Pulau Kijang

#### GAMBAR 3.2

##### 1. Daftar Direktur RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang

		
<b>dr. Bustanul Aswat, MARS</b>	<b>dr. Dwi Gunawan Ponidi, M.Kes</b>	<b>dr. H. Iswandi</b>

##### 2. Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang sekarang ini belum memiliki SDM (Personal) yang memadai untuk memberikan pelayanan dirumah sakit dan belum memenuhi standarisasi pelayanan kesehatan yang meningkatkan kinerja rumah sakit. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang yang lebih jelasnya seperti pada tabel berikut :

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 3.1

## Sumber Daya Manusia RSUD Tengku Sulung

SUMBER DAYA MANUSIA		JUMLAH
1. Dokter Umum		
PNS	3	Orang
PTT	0	Orang
Kontrak	2	Orang
Sukarela	0	Orang
2. Dokter Gigi		
PNS	1	Orang
3. Dokter Ahli / Spesialis		
1. Bedah Subspesialis		
2. Bedah Umum	1	Orang
3. Asisten Bedah Umum (Residen)	0	Orang
4. Anak	0	Orang
5. Penyakit Dalam	1	Orang
6. Kebidanan & Kandungan	1	Orang
7. Asisten Kebidanan & Kandungan	0	Orang
8. T.H.T	0	Orang
9. Radiologi	0	Orang
10. Mata	0	Orang
11. Saraf	0	Orang
12. Anasthesi	0	Orang
13. Asisten Anastesi	1	Orang
14. Patologi Klinik	0	Orang
15. Kulit dan Kelamin	0	Orang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>4. S1. Kesehatan Masyarakat</b>		
PNS	1	Orang
Kontrak	0	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>5. S1. Keperawatan</b>		
PNS	3	Orang
Kontrak	5	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>6. D3 Keperawatan</b>		
PNS	9	Orang
Kontrak	15	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>7. SPK</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	1	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>8. D3 Kebidanan</b>		
PNS	1	Orang
Kontrak	22	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>9. D1. Kebidanan</b>		
	0	Orang
<b>10. Apoteker</b>		
PNS	2	Orang
Kontrak	0	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>11. S1. Farmasi</b>		
PNS	0	Orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kontrak	0	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>12. Asisten Apoteker</b>		
PNS	2	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>13. D3 Fisioterapi</b>		
PNS	1	Orang
Kontrak	0	Orang
<b>14. D3 Analis Kesehatan</b>		
PNS	2	Orang
Kontrak	2	Orang
<b>15. SMAK</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	0	Orang
<b>16. D3. Sanitasi</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	0	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>17. Hiperkes</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	0	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>18. D1. SPPH</b>	0	Orang
<b>19. D3 GIGI</b>		
PNS	1	Orang
Kontrak	0	Orang
<b>20. SPRG</b>	0	Orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>21. D3. Apikes</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	0	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>22. S1. Gizi</b>		
PNS	1	Orang
<b>23. D3. Gizi</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	1	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>24. D3. ATEM</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	0	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>24. D3. ATRO</b>		
PNS	2	Orang
Kontrak	0	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>25. S1. Administrasi</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	4	Orang
Sukarela	0	Orang
<b>26. D1</b>		
Sukarela	0	Orang
<b>27. SMA</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	23	Orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukarela	0	Orang
<b>28. SLTP</b>		
PNS	0	Orang
Kontrak	0	Orang
<b>29. SD</b>		
Kontrak	0	Orang

*Sumber : Data Kepegawaian RSUD TENGGU SULUNG*

### 3. Sarana Dan Prasarana

Sedangkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Rsud Tengku Sulung dapat dilihat dalam Tabel Berikut :

**TABEL 3.2**

#### **Sarana dan Prasarana RSUD Tengku Sulung**

<b>SARANA &amp; PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	
Gedung Kantor	1	Unit
Gedung Spesialis Bedah Central	1	Unit
Gedung HCU / ( 3 TT )	1	Unit
Gedung Farmasi (Apotik BPJS, Jamkesmas, Askes & Apotek Pelengkap)	1	Unit
Gedung Unit Gawat Darurat	1	Unit
Gedung Bank Darah	1	Unit
Gedung Poliklinik Meliputi :		
◆ Poli Umum	1	Unit
◆ Poli Interna	1	Unit

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



◆ Poli Bedah	1	Unit
◆ Poli Kebidanan & Kandungan	1	Unit
◆ Poli Anak	1	Unit
◆ Poli Gigi	1	Unit
Gedung Unit Labor	1	Unit
Gedung Rontgen	1	Unit
Gedung Perawatan Umum	1	Unit
Gedung Perawatan Kebidanan	1	Unit
Ruang High Care Unit	1	Unit
Rumah Dinas	7	Unit
Pembakaran Limbah Medik	1	Unit
Mobil Ambulance	1	Unit
Tempat Tidur	32	Unit

Sumber : Data Bagian Umum RSUD Tengku Sulung

RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Tahun 2019 mempunyai 32 tempat tidur tersebar pada 7 (tujuh) perawatan, yaitu :

1. Perawatan : 14 Tempat tidur
2. Perawatan KIA : 14 Tempat tidur
3. UGD : 2 Tempat tidur
4. HCU : 2 Tempat tidur

**Total**

**32 Tempat tidur**

4. Pelayanan Kesehatan Meliputi :

1. Pelayanan Medik Umum
  - Poliklinik Umum
  - Unit Gawat Darurat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bedah
  - Non Bedah
  - Kebidanan & Kandungan
2. Pelayanan Medik Spesialistik
- a. Pelayanan Medik Spesialistik :
    - Pelayanan Medik Spesialis Hanya Dilakukan Sebulan Sekali
  - b. Pelayanan Penunjang Medik :
    - Instalasi Laboratorium
    - Instalasi Radiologi
    - Instalasi Gizi
    - Instalasi Farmasi
    - Instalasi Kendaraan Medik ( Ambulance )
5. Evaluasi Pelayanan Kesehatan RSUD TENGKU SULUNG Pulau Kijang
- a. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan

**TABEL 3.3**

**Tabel Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan 2018 S/d juni Tahun 2019**

NO	Tahun	Jumlah Pasien
1.	2018	2896
2	2019	964

*Sumber : Rekam Medik RSUD TENGKU SULUNG*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap

**TABEL 3.4**

**Tabel Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap 2018 S/d Juni Tahun 2019**

NO	Tahun	Jumlah Pasien
1	2018	856
2	2019	163

Sumber : Data Rekam Medik RSUD TENGGU SULUNG

**TABEL 3.5****TABEL RAWAT INAP 2018**

Bulan Kunjungan	UMU M	BPJ S	KIS	JAMPE RSAL	ASKES	Total Kunjungan
JANUARI	34	2	7	1	1	45
FEBRUARI	45	1	17	1	0	64
MARET	38	3	34	4	2	81
APRIL	20	3	21	2	1	47
MEI	37	3	20	2	1	63
JUNI	51	10	16	2	0	79
JULI	35	25	30	1	5	96
AGUSTUS	20	6	17	0	3	46
SEPTEMBER	29	10	45	9	5	98
OKTOBER	25	6	33	10	5	79
NOVEMBER	28	12	26	6	4	76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DESEMBER	27	9	17	6	8	67
	<b>389</b>	<b>28</b>	<b>283</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>779</b>

Adapun perkembangan upaya pelayanan kesehatan RSUD TENGKU SULUNG yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel indikator pelayanan dibawah ini :

**TABEL 3.6**

**Tabel Indikator Pelayanan RSUD TENGKU SULUNG Tahun 2016 s/d Desember 2018**

Uraian	2016	2017	2018
Tingkat Pemanfaat Tempat Tidur (BOR)	<b>8,2%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,9%</b>
Rata-rata lama rawat (LOS)	<b>4 Hari</b>	<b>4 Hari</b>	<b>4 Hari</b>
Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO)	<b>7,9 Kali</b>	<b>7,7 Kali</b>	<b>4 Kali</b>
Rata-rata Lama Tempat Tidur Tidak Dipakai (TOI) dalam sehari	<b>44 Hari</b>	<b>43 Hari</b>	<b>40,90 Hari</b>
Angka Kematian Bersih (NDR)	<b>14,4 %</b>	<b>14,3 %</b>	<b>1,2 %</b>
Angka Kematian Kasar (GDR)	<b>22,4 %</b>	<b>23,6 %</b>	<b>2,52 %</b>

*Sumber : Data Rekam Medik RSUD TENGKU SULUNG*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL 3.7**

**Tabel Indikator Pelayanan RSUD TENGKU SULUNG Pulau Kijang**  
**TAHUN 2015- 2018**

<i>TAHUN</i>	<i>BOR</i>	<i>LOS</i>	<i>BTO</i>	<i>TOI</i>	<i>NDR</i>	<i>GDR</i>
2015	8,40%	4	7,7	43	14,3	23,6
2016	12,08%	2	7,29	15,3	35,94	68,62
2017	13,70%	3	16,68	19,53	38,8	70,8
2018	14,70%	2	27	12	40,9	75,2

*Sumber : Data Rekam Medik RSUD TENGKU SULUNG*

Dengan melihat tabel indikator pelayanan yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa Rsud Tengku Sulung telah berupaya keras dalam mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat tanpa melupakan kualitas pelayanan, dan Rsud Tengku Sulung akan senantiasa berupaya meningkatkan terus pelayanan dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan visi dan misi Rsud Tengku Sulung .

**Distribusi 10 Kasus Penyakit Terbanyak Rawat Inap TAHUN 2018**

- |               |    |
|---------------|----|
| 1. Dispepsia  | 51 |
| 2. Hipertensi | 48 |
| 3. TB Paru    | 33 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Diabetes Militus	30
5. Anemia	29
6. Colic Abdomen	27
7. Chf	24
8. HHD	15
9. Hiper colesterolemia	12
10. Stroke	12

#### Distribusi 10 Kasus Penyakit Terbanyak Rawat Jalan TAHUN 2018

1. Dispepsia	60
2. Hipertensi	58
3. TB Paru	49
4. Diabetes Militus	36
5. Anemia	35
6. Colic Abdomen	33
7. Chf	32
8. HHD	30
9. Hiper colesterolemia	18
10. Stroke	10

#### 6. Profil Pengunjung Rumah Sakit

Pengunjung RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Sampai Dengan  
Desember Tahun 2018 Sebanyak 3752 Kunjungan, terdiri dari 2896

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengunjung Rawat Jalan dan 856 Rawat Inap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.8**

**a. Perincian Cara Bayar Pasien Rawat Jalan Dan Rawat Inap**

**Tahun 2018**

URAIAN	JUMLAH
UMUM	1950
KIS	531
BPJS	770
ASKES	47
JAMPERSAL	80
<b>JUMLAH</b>	<b>3378</b>

**b. Perincian Menurut Jenis Kasus Ugd Dan Tindak Lanjut**

**Pengobatan Tahun 2018**

**TABEL 3.9**

JENIS KASUS	DI RAWAT	DI RUJUK	PULANG	MATI SEBELUM DIRAWAT	TOTAL
BEDAH	4	2	15	0	21
NON BEDAH	22	6	13	3	44
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>65</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Perincian Jenis Kasus Berdasarkan Cara Masuk Pasien Ugd

**TABEL 3.10**

N O	JENIS KASUS	CARA MASUK		JUMLAH
		RUJUKAN	NON RUJUKAN	
1	BEDAH	2	19	21
2	NON BEDAH	6	35	11
	<b>JUMLAH</b>	8	54	62

#### 4.4 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sugiyono (2011:9) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiyono (2011:8) adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Selanjutnya Sugiyono (2011:10) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, secara utuh, karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian kualitatif bersifat utuh dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu

saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus secara deskriptif, yaitu perbandingan antara teori, konsep, standar, atau arsip yang berlaku dengan praktek yang ada di dalam organisasi kemudian mengambil kesimpulan dan saran dari hasil perbandingan tersebut. Robert K. Yin dalam Wirawan (2011:178) menyatakan studi kasus merupakan cerita mengenai sesuatu yang unik, khusus, menarik—cerita tersebut dapat mengenai individu-individu, proses, program- program, rukun tetangga, institusi-institusi, dan bahkan kejadian-kejadian. Tujuan utama dari studi kasus adalah untuk memahami siklus kehidupan unit analisis secara mendalam suatu kebijakan, program atau proyek yang dievaluasi.

#### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Sulung Pulau Kijang yang terletak di wilayah Kabupaten Inhil. Tepatnya berada di Jl.Penunjang Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inhil 29273. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah dikarenakan RSUD Tengku Sulung sudah bersatus Badan Layanan Umum dan alasan yang lainnya adalah dikarenakan tersedianya akses untuk melakukan penelitian di sana.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang dapat diperoleh melalui wawancara langsung dari pihak-pihak terkait dan observasi. Pihak-pihak yang terkait adalah pihak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang sudah tersedia seperti data-data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem anggaran pada RSUD Tengku Sulung.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2011:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2011:225) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Berdasarkan teori tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2011:226) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif pasif. Yang dimaksud dengan observasi partisipatif pasif adalah peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

### 2. Wawancara

Jenis wawancara yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, yang menurut Sugiyono (2011:233) pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Selain itu, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

### 3. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono (2011:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan untuk mendukung dua metode sebelumnya adalah berupa dokumen berita acara penyusunan dan pengesahan anggaran. Menurut Wirawan (2011:210) studi dokumen dilakukan melalui proses: (1) meneliti keaslian dokumen; (2) memilih dokumen yang diperlukan oleh evaluasi; dan (3) meneliti isinya.

#### 4.5 Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2011:244) menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:246) mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman dalam analisis data di lapangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikut langkah-langkah analisis data menurut Mpdel Miles and Huberman:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Proses reduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu sebuah temuan dalam penelitian tersebut. Reduksi data memepermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun tidak menutup kemungkinan penyajian data juga didukung dengan grafik, tabel maupun *chart* untuk melengkapi penjelasan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan yang dihasilkan dari dua proses sebelumnya diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penyajian data yang

dikemukakan nanti bila telah didukung dengan data-data yang lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat kredibel.

Dari analisis data menurut Mpdel Miles and Huberman di atas, penulis mengembangkan langkah-langkah analisis data untuk penelitian ini seperti berikut:

- a. Mengidentifikasi penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada RSUD Tengku Sulung
  1. Menggali data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan berhubungan dengan anggaran berbasis kinerja;
  2. Apabila data dan dokumen belum memadai untuk diolah dalam penelitian dan belum menemukan dalam rumusan masalah, maka penulis akan menggali informasi-informasi dari para informan melalui wawancara,;
  3. Mengolah data sesuai dengan praktik penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh RSUD Tengku Sulung, Membandingkan kesesuaian praktik penyusunan anggaran berbasis kinerja oleh RSUD Tengku Sulung dengan standar penyusunan anggaran berbasis kinerja yang ada;
  4. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut apakah anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang ada.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3.3



Foto bersama narasumber: Hendri S.Kep

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian lalu menganalisis dan membahas pada bab IV, di temukan beberapa masalah pada penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di RSUD Tengku Sulung yang di simpulkan sebagai berikut :

- a. Terdapat perbedaan antara dokumen pelaksana anggaran yang di gunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dengan laporan realisasi anggaran, perbedaan tersebut terletak pada akun belanja barang dan jasa sebesar Rp.200.000.000 dan pada akun belanja modal sebesar Rp.5.910.000.000,00.
- b. Dalam realisasi anggaran terdapat ketidakefektifan dalam penyerapan anggaran, Yaitu pada akun tunjangan fungsional umum hanya tercapai sebesar 59,67%, kemudian pada akun tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi hanya tercapai sebesar 44,35% dan pada akun belanja barang dan jasa BLUD terserap sebesar 125% yang berarti melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan. Padahal seharusnya menurut pedoman anggaran berbasis kinerja , setiap anggaran yang di keluakan haruslah sesuai dengan target yang telah di tetapkan.
- c. Terdapat kesalahan dalam peyajian kode akun yang tertera pada laporan realisasi anggaran dan pada catatan atas laporan keuangan. Setelah di

lakukan analisis , penulis menyajikan kode akun laporan realisasi anggaran sesuai dengan yang tercatat pada catatan atas laporan keuangan.

- d. Anggaran berbasis kinerja mengacu pada efektif dan efektifitas penggunaan anggaran, ketika dana yang di anggarkan tidak dapat terserap dengan baik, berarti masih kurangnya pihak RSUD tengku sulung dalam melakukan penerapan anggaran berbasis kinerja.

## Saran

- a. bagi pihak RSUD Tengku Sulung
  1. sebaiknya pihak RSUD harus lebih teliti lagi dalam merincikan anggaran, sehingga tidak terjadi lagi selisih antara laporan realisasi anggaran dan dokumen pelaksana anggaran.
  2. sebaiknya pihak RSUD Tengku Sulung haruslah lebih meningkatkan kinerja nya, sehingga penyerapan anggaran juga lebih maksimal.
  3. sebaiknya pihak RSUD Tengku sulung haruslah lebih teliti lagi dalam penyajian laporan realisasi anggaran, sehigga tidak ada lagi kesalahan dalam penyajian laporan realisasi anggaran.
- b. bagi pihak peneliti
  1. di harapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan analisis tentang penerapan anggaran berbasis kinerja , lebih baik untuk menambah tahun anggaran minimal 2 atau 3 tahun terakhir, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagaimana perkembangan penerapan anggaran berbasis kinerja RSUD Tengku sulung dan melakukan analisis tentang penyebab dari kendala-kendala yang terjadi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan 2012 Pt. Cordoba Internasional Indonesia Bandung
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati, (2011). *Sistem Informasi Akuntansi Perancangan, Proses dan Penerapan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Farid, Miftah Akbar (2014) Skripsi : “Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Pada Rumah Sakit Bersalin Ibu Dan Anak Idaman Ass’adiyah Sukorejo Situbondo”
- Isnaini, Dessy Syafitri. (2016), Skripsi : “Evaluasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang”
- Juliani, Henny. (2018), *Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik*. Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018 ISSN 2621 – 2781
- Liawan, calvin. (2018), *Analisis Penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota sorong*. Jurnal Pitis AKP, Vol 3 No.1 Juli 2018
- Lukman, Mediya (2013). *Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UII Press
- Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2014). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information System (Edisi 13)*. Jakarta: Salemba Empat
- Moehariono. (2012). *Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Aplikasi, dan Pengembangan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nanda, Reza dan Darwanis. (2016) *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1, No. 1, Halaman 327-340
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, jakarta: Salemba Empat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sua
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pontoh, Winston. (2013). *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta Barat : Penerbit Halaman Moeka Publishing
- Rahadi, Dedi Rianto. (2010). *Manajemen kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang : Tunggul Mandiri
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 *tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 *tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum*
- Rasongko, Catur dan Parulian safrida Rumondang (2010). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press
- Waluyo, Indarto (2011). *Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. IX. No. 2 – Tahun 2011, Hlm. 1 - 15
- Zuraidha, Aliefiah Arief. (2015), Skripsi. “*Evaluasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Studi Kasus Pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan)*”



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sejak tahun berapa RSUD Tengku sulung berubah status menjadi BLUD ?
2. Bagaimana proses penyusunan anggaran di lakukan ?
3. Apakah RSUD tengku sulung sudah menetapkan rensta sesuai dengan visi, misi, dan tujuan RSUD ?
4. Apakah RSUD sudah menetapkan indikator kinerja , program dan kegiatan, dan penetapan standar biaya ?
5. Apa saja kendala dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada RSUD Tengku Sulung ?
6. Apa yang menyebabkan anggaran pada akun tunjangan fungsional umum hanya terserap sebesar 59,67% , dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi hanya terserap sebesar 44,35% ?
7. Apa yang menyebabkan kelebihan penggunaan anggaran pada kegiatan belanja barang dan jasa hingga mencapai 125% ?
8. Di temukan selisih antara laporan realisasi anggaran dan dokumen pelaksana anggaran, selisih tersebut di temukan pada akun dana pemeliharaan gedung pada belanja barang dan jasa, dan penyediaan alat-alat kedokteran umum pada belanja modal. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ?
9. Pada laporan realisasi anggaran di temukan tidak sesuainya kode rekening yang tercatat dengan kode akun atau kode rekening yang telah tertera pada catatan atas laporan keuangan, apa yang menyebabkan hal itu terjadi?





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR JAWABAN WAWANCARA

1. Sejak tahun 2016
2. Penyusunan anggaran di lakukan berdasarkan usulan masing – masing ruangan ke kasih-kasih , jadi masing- masing ruangan mengajukan ke seksi – seksi, terdapat 2 seksi, yakni seksi pelayanan dan seksi keperawatan . kemudian setelah diajukan seksi melaporkan ke bagian perencanaan, setelah bagian perencanaan mendapatkan daftar usulan anggaran, baru di rapatkan masing-masing pejabat yang ada termasuk direktur untuk menentukan usulan yang mana yang di prioritaskan.
3. Renstra BLUD dan APBD sudah di tetapkan .
4. Indikator kinerja juga sudah di tentukan oleh pihak RSUD.
5. Kendala dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada RSUD tengkusulung terdapat pada bagian SDM. Sumber Daya Manusia di RSUD tengku Sulung yang mengerti tentang anggaran tidak banyak , yang mengerjakan masalah penganggaran , masalah keungan banyak yang dari tenaga perawat , tenaga fungsional dan tenaga kesehatan lainnya. jadi , tidak sesuai dengan basic pendidikan. Termasuk tenaga labor yang manyusun bagian perencanaan.
6. Pada belanja tidak langsung, termasuk belanja pegawai, tunjangan fungsional dan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang dana nya di tetapkan oleh pemerintah daerah atau dana APBD . hal ini terjadi karena terlalu besar nya dana

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di anggarkan oleh APBD, sementara secara riil nya RSUD tidak membutuhkan dana sebanyak itu. Sehingga terjadi rendahnya realisasi anggaran .

7. Pada dasarnya target pendapatan awalnya hanya Rp. 1.500.000.000,00 , ternyata seiring berjalannya waktu melebihi target mencapai 2,7 Milyar, terus RSUD tetap melakukan pembelanjaan , menunggu anggaran perubahan pada bulan oktober, ternyata seluruh dinas di inhil pada saat itu tidak ada yang melakukan perubahan anggaran, sementara RSUD sudah melakukan pembelanjaan lebih dari 100%, belanja tersebut di gunakan berdasarkan kebutuhan RSUD . kelebihan tersebut terjadi karena tidak adanya anggaran perubahan pada tahun 2018, sehingga RSUD tidak bisa merubah target anggaran pada tahun 2018.
8. Pengadaan alat di dapatkan dari dana bankeu atau bantuan keuangan, dana itulah yang di gunakan untuk pengadaan alat. Dana bankeu masuk di pertengahan tahun setelah DPA di susun dan di sahkan.
9. Format Laporan realisasi anggaran sudah di tetapkan oleh pusat atau BPKAD .

Peneliti



**Fitviah nur kumala**  
11573205268

Narasumber



**Hendri, S. Kep**  
NIP. 19780505 199703 1 002

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
SKPD : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018 dan 2017

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>2.567.946.176,00</b>	<b>171,20</b>	<b>1.141.989.286,00</b>
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.500.000.000,00	2.567.946.176,00	171,20	1.141.989.286,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.500.000.000,00	2.567.946.176,00	171,20	1.141.989.286,00
1.1.4.15.	Pendapatan dari BLUD	1.500.000.000,00	2.567.946.176,00	171,20	1.141.989.286,00
1.1.4.15.01.	Pendapatan dari Jasa Layanan BLUD	749.040.000,00	2.567.946.176,00	342,83	1.141.496.406,00
1.1.4.15.06.	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	750.960.000,00	-	-	492.880,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>15.387.271.536,06</b>	<b>14.046.463.487,69</b>	<b>91,29</b>	<b>10.184.122.941,49</b>
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.883.313.338,00	1.573.755.137,00	83,56	1.666.079.392,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.883.313.338,00	1.573.755.137,00	83,56	1.666.079.392,00
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.113.405.213,00	995.805.137,00	89,44	1.107.479.392,00
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	850.696.313,00	770.425.000,00	90,56	868.936.468,00
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	88.366.196,00	83.886.348,00	94,93	85.709.428,00
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	49.360.000,00	36.400.000,00	73,74	38.460.000,00
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	38.045.438,00	33.670.000,00	88,50	40.265.000,00
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.462.250,00	14.000.000,00	59,67	16.950.000,00
2.1.1.01.06.	Tunjangan Bersih	56.828.128,00	51.273.360,00	90,23	57.139.380,00
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	37.461,00	30.300,00	80,88	6.850,00
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.542,00	10.786,00	86,00	12.266,00
2.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.714.424,00	1.584.914,00	92,45	-
2.1.1.01.23.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.882.461,00	4.524.429,00	92,67	-
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	769.908.125,00	577.950.000,00	75,07	558.600.000,00
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sesi Kerja	528.708.125,00	478.950.000,00	90,59	471.900.000,00
2.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	13.000.000,00	-	-	-
2.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	223.200.000,00	99.000.000,00	44,35	86.700.000,00
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>13.503.958.198,06</b>	<b>12.472.708.350,69</b>	<b>92,36</b>	<b>8.518.043.549,49</b>
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	165.840.000,00	144.180.000,00	86,94	129.960.000,00
2.2.1.01.	Honorarium PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	1.600.000,00
2.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	100,00	350.000,00
2.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	100,00	900.000,00
2.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	240.000,00	240.000,00	100,00	350.000,00
2.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	164.400.000,00	142.740.000,00	86,82	128.360.000,00
2.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	164.400.000,00	142.740.000,00	86,82	128.360.000,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.805.657.600,00	4.831.101.132,00	100,53	3.903.803.522,00
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	225.105.000,00	225.099.000,00	100,00	304.950.806,00
2.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.905.000,00	26.905.000,00	100,00	27.000.000,00
2.2.2.01.04.	Belanja Perangko, material dan benda pos lainnya	4.200.000,00	4.199.000,00	99,98	2.496.000,00

Permendagri 13





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	15.000.000,00
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.150.000,00	12.145.000,00	99,96	77.580.000,00
2.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	80.160.000,00
2.2.2.01.09.	Belanja Bahan habis pakai Material Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	99.714.806,00
2.2.2.01.23.	Belanja Bahan Pelumas	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00	3.000.000,00
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.873.600,00	101.691.061,00	96,97	209.619.120,00
2.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	103.073.600,00	99.891.061,00	96,91	198.819.120,00
2.2.2.02.07.	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	10.800.000,00
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	552.000.000,00	550.720.952,00	99,77	1.074.582.685,00
2.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	3.300.000,00	91,67	3.000.000,00
2.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	41.020.952,00	97,67	30.682.685,00
2.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/Internet	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	6.300.000,00
2.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	50.000.000,00
2.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00	7.800.000,00
2.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Tukang/Televisi/Operator/Asisten	25.550.000,00	25.550.000,00	100,00	54.600.000,00
2.2.2.03.23.	Belanja Jasa Satuan Keamanan	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	31.200.000,00
2.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pengemudi	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	8.400.000,00
2.2.2.03.30.	Belanja Jasa Petugas Administrasi Perkantoran	70.500.000,00	70.500.000,00	100,00	165.120.000,00
2.2.2.03.33.	Belanja Jasa Petugas Kesehatan	382.800.000,00	382.800.000,00	100,00	717.480.000,00
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	15.721.000,00
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	-	-	-	13.500.000,00
2.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	-	-	2.221.000,00
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	18.000.000,00
2.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	8.100.000,00
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	9.900.000,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	161.000.000,00	161.000.000,00	100,00	71.329.000,00
2.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	37.500.000,00
2.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Pasien	89.000.000,00	89.000.000,00	100,00	33.829.000,00
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	371.079.000,00	371.175.000,00	99,76	389.574.448,00
2.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	371.079.000,00	371.175.000,00	99,76	389.574.448,00
2.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PPKS	275.000.000,00	-	-	32.888.000,00
2.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	-	-	-	32.888.000,00
2.2.2.17.03.	Belanja bimbingan Teknis	275.000.000,00	-	-	-
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.400.000,00	99,70	40.940.000,00
2.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	200.000.000,00	199.400.000,00	99,70	40.940.000,00
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	-	-	-	50.000.000,00
2.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-	-	50.000.000,00
2.2.2.25.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.285.600.000,00	1.607.015.119,00	125,00	806.198.463,00
2.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	1.285.600.000,00	1.607.015.119,00	125,00	806.198.463,00
2.2.2.26.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber	1.620.000.000,00	1.605.000.000,00	99,07	890.000.000,00

Permendagri 13



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.26.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.620.000.000,00	1.605.000.000,00	99,07	890.000.000,00
2.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	8.532.460.598,06	7.497.427.218,69	87,87	4.484.280.027,49
2.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut Darat Bermotor	-	-	-	17.896.000,00
2.2.3.03.12.	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	-	-	-	17.896.000,00
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-	6.930.000,00
2.2.3.10.12.	Belanja modal pengadaan Peralatan Audio Visual	-	-	-	1.980.000,00
2.2.3.10.16.	Pengadaan Peralatan Laundry	-	-	-	4.950.000,00
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.800.000,00	21.900.000,00	96,05	35.470.000,00
2.2.3.12.02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	-	-	-	22.470.000,00
2.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	22.800.000,00	21.900.000,00	96,05	-
2.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet	-	-	-	13.000.000,00
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	-	-	-	25.080.000,00
2.2.3.13.11.	Belanja modal pengadaan Furniture dan Interior	-	-	-	25.080.000,00
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	-	-	9.800.000,00
2.2.3.14.05.	Belanja modal pengadaan kulkas	-	-	-	9.800.000,00
2.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	5.910.000.000,00	5.145.121.656,69	87,06	3.172.111.527,58
2.2.3.19.01.	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	5.910.000.000,00	5.145.121.656,69	87,06	3.172.111.527,58
2.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	-	-	149.480.000,00
2.2.3.23.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	-	-	-	149.480.000,00
2.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	-	-	-	28.900.000,00
2.2.3.25.01.	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	-	-	-	28.900.000,00
2.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*) Bangunan	2.549.660.598,06	2.287.764.562,00	89,73	1.016.037.999,91
2.2.3.26.01.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.549.660.598,06	2.287.764.562,00	89,73	939.616.999,91
2.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pendukung	-	-	-	76.421.000,00
2.2.3.32.	Belanja Modal BLUD	50.000.000,00	42.641.000,00	85,28	22.574.500,00
2.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	50.000.000,00	42.641.000,00	85,28	22.574.500,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(13.887.271.536,06)</b>	<b>(11.478.517.311,69)</b>	<b>82,65</b>	<b>(9.042.133.655,49)</b>

Permendagri 13



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6

Tembilahan, 31 Desember 2018

PENGGUNA ANGGARAN



dr. H. ISWANDI  
Nip. 19710204 200604 1 008

Permendagri 13

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

101  
H. SAID SYARIFUDIN  
ms. kamau.s.kg

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-SKPD				
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018						
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN						
ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG						
Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
1	2	3				
4.	PENDAPATAN	1.500.000.000,00				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.500.000.000,00				
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.500.000.000,00				
	JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000.000,00				
5.	BELANJA	9.277.271.536,06				
5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.883.313.338,00				
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.883.313.338,00				
5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.393.958.198,06				
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	165.840.000,00				
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.605.657.600,00				
5.2.3.	BELANJA MODAL	2.622.460.598,06				
	JUMLAH BELANJA	9.277.271.536,06				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.777.271.536,06)				
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan						
NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	Pendapatan	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	1.500.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	470.828.334,00	470.828.334,00	470.828.334,00	470.828.336,00	1.883.313.338,00
2.2	Belanja langsung	2.118.930.384,00	3.149.005.069,00	1.094.696.645,00	1.031.526.100,00	7.393.958.198,06
2.1	Personnel Pembelian					
3.1	Pergerakan Pembelian					
Tembilahan, 02 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH  H. SAID SYARIFUDIN NIP. 19631211 199903 1 011						



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD 01.02.1.01.02.03.00.00	Formulir DPA-SKPD 1		
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
RUJUKAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLUNG					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
1	2	Volume	Satuan	Tarif / Harga	6 = (3 x 5)
	PENDAPATAN				1.500.000.000,00
	Pendapatan Asli Daerah				1.500.000.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				1.500.000.000,00
	Pendapatan dari BLUD				1.500.000.000,00
41.4.15.01.	Pendapatan dari Jasa Layanan BLUD				749.040.000,00
	Rokam Medis	1.00	tahun	10.260.000,00	10.260.000,00
	Tindakan Medis / Operasi	1.00	tahun	195.975.000,00	195.975.000,00
	Rawat Inap	1.00	tahun	99.000.000,00	99.000.000,00
	Farmasi	1.00	tahun	242.600.500,00	242.600.500,00
	Laboratorium	1.00	tahun	43.186.500,00	43.186.500,00
	Ambulance	1.00	tahun	7.590.000,00	7.590.000,00
	Konsultasi Medis / Visite Dokter	1.00	tahun	93.690.000,00	93.690.000,00
	Oktapan	1.00	tahun	39.258.000,00	39.258.000,00
	Sal	1.00	tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
	Rontgen	1.00	tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
	Jasa BPJS	1.00	tahun		
	Jasa Jambore	1.00	tahun		
41.4.15.06.	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah				750.960.000,00
	JASA JAMBORIS	1.00	tahun	750.000.000,00	750.000.000,00
	KEANGKARAN	1.00	tahun	960.000,00	960.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>1.500.000.000,00</b>
Mengesahkan		Tembilahan, 02 Januari 2018			
 <b>MIZUAR EPENDI, SH</b> NIP. 19631231 199503 1 009		 <b>PENGOTINA ANGGARAN</b> dr. H. ISWANDI NIP. 19710204 200604 1 008			
Rencana Pendapatan per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	375.000.000,00			
Triwulan II	Rp.	375.000.000,00			
Triwulan III	Rp.	375.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.	375.000.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.500.000.000,00</b>			





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD 01.02.1.01.02.03.00.00.1		Formulir DPA-SKPD 2.1	
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018							
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN							
ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING							
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
1	2	Volume	Satuan	Tarif / Harga	6 = (3 x 5)		
5.	BELANJA				1.883.313.338,00		
5.1.	Belanja Tidak Langsung				1.883.313.338,00		
5.1.1.	Belanja Pegawai				1.883.313.338,00		
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan				1.140.568.838,00		
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				881.592.514,00		
	Golongan IV (0 Orang x 14 Bulan)		00				
	Golongan III (13 Orang x 14 Bulan)	182	00	3.154.030,00	574.033.460,00		
	Golongan II (8 Orang x 14 Bulan)	112	00	2.569.758,00	287.812.896,00		
	Golongan I (0 Orang x 14 Bulan)		00				
	Akres	1	Tahun	19.746.158,00	19.746.158,00		
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga				86.890.566,00		
	TUNJANGAN ISTRI :		00				
	Golongan IV (0 Orang x 12 Bulan)		00				
	Golongan III (11 Orang x 12 Bulan)	143	00	275.731,00	39.429.533,00		
	Golongan II (5 Orang x 12 Bulan)	65	00	217.358,00	14.128.270,00		
	Golongan I (0 Orang x 12 Bulan)		00				
	TUNJANGAN ANAK :		00				
	Golongan IV (0 Orang x 12 Bulan)		00				
	Golongan III (19 Orang x 12 Bulan)	247	00	96.943,00	23.944.921,00		
	Golongan II (8 Orang x 12 Bulan)	104	00	69.890,00	7.268.560,00		
	Golongan I (0 Orang x 12 Bulan)		00				
	Akres	1	Tahun	2.119.282,00	2.119.282,00		
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jansan				40.820.000,00		
	Sebulan III/6 (1 Orang x 12 Bulan)	13	00		12.740.000,00		
	Sebulan IV/6 (4 Orang x 12 Bulan)	39	00	980.000,00	38.080.000,00		
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional				43.939.420,00		
	Golongan IV (0 Orang x 12 Bulan)		00				
	Golongan III (8 Orang x 12 Bulan)	78	00	345.834,00	26.975.052,00		
	Golongan II (5 Orang x 12 Bulan)	65	00	240.000,00	15.600.000,00		
	Akres	1	Tahun	1.064.376,00	1.064.376,00		
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum				21.853.000,00		
	Golongan IV (0 Orang x 12 Bulan)		00				
	Golongan III (4 Orang x 12 Bulan)	52	00	185.000,00	9.620.000,00		
	Golongan II (5 Orang x 12 Bulan)	65	00	190.000,00	12.350.000,00		
	Golongan I (0 Orang x 12 Bulan)		00				
	Akres	1	Tahun	533.000,00	533.000,00		
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras				61.759.895,00		
	Tunjangan beras (21 Orang x 12 Bulan)	273	00	220.709,00	60.257.537,00		
	Akres	1	Tahun	1.506.358,00	1.506.358,00		
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus				6.850,00		
	Golongan IV (0 Orang x 12 Bulan)		00				
	Golongan III (0 Orang x 12 Bulan)		00				
	Akres	1	Tahun				
5.1.1.01.08.	Tunjangan Khusus Gaji 13				6.850,00		
	Penambahan Gaji (21 Orang x 12 Bulan)	273	00		12.592,00		
	Akres	1	Tahun	45,00	12.265,00		
5.1.1.01.12.	Tunai Jamakan Kebutuhan Kerja (JKK)				307,00		
	Tunai JKK (21 Orang x 12 Bulan)	252	00	6.967,00	1.753.464,00		
	Akres	1	Tahun	41.262,00	41.262,00		
5.1.1.01.23.	Tunai Jamakan Kebutuhan (JKM)				2.217.247,00		
	Tunai JKM (21 Orang x 12 Bulan)	252	00	8.790,00	2.217.247,00		
	Akres				54.098,00		





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

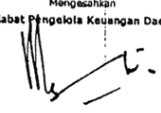

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				501.547.500,00
	TUGAS LAINNYA :				
	* Pengupia Anggapan (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR		
	* Bendahara Pengeluaran (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	1.750.000,00	21.000.000,00
	* Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	1.450.000,00	17.400.000,00
	* Bendahara Penarikan (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	700.000,00	8.400.000,00
	* Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	1.500.000,00	18.000.000,00
	* Pembantu PPK (2 Orang x 12 Bulan)	24	OR	700.000,00	16.800.000,00
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH				
	Pengupia Barang (PB) (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR		
	Pejabat Penatausahaan Pengupia Barang (PPB) (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	2.500.000,00	30.000.000,00
	Pengupia Barang Pengupia (PBG) (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	1.500.000,00	18.000.000,00
	Pembantu Pengupia Barang Pengupia (PPBP) (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	1.500.000,00	18.000.000,00
	Pembantu Pengupia Barang Pengupia (PPBP) (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	750.000,00	9.000.000,00
	BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB :				
	Peningkatan Jumlah Penatausahaan (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	1.000.000,00	12.000.000,00
	STRUKTURAL :				
	Es. II b (0 Orang x 12 Bulan)		OR		
	Es. III a (Gol. IV) (0 Orang x 12 Bulan)		OR	4.000.000,00	
	Es. III a (Gol. III) (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	3.700.000,00	44.400.000,00
	Es. III b (Gol. IV) (0 Orang x 12 Bulan)		OR	3.600.000,00	
	Es. III b (Gol. III) (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	3.150.000,00	37.800.000,00
	Es. IV a (Gol. IV) (0 Orang x 12 Bulan)		OR	3.050.000,00	
	Es. IV a (Gol. III) (3 Orang x 12 Bulan)	36	OR	2.750.000,00	99.000.000,00
	Es. IV b (0 Orang x 12 Bulan)		OR	2.650.000,00	
	Es. IV b (0 Orang x 12 Bulan)		OR	2.450.000,00	
	FUNGSIONAL :				
	Gol. IV (0 Orang x 12 Bulan)		OR	950.000,00	
	Gol. III (9 Orang x 12 Bulan)	108	OR	850.000,00	91.800.000,00
	Gol. II (4 Orang x 12 Bulan)	48	OR	675.000,00	64.800.000,00
	Gol. I (0 Orang x 12 Bulan)		OR	650.200,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Koreksi Kerja				1.147.500,00
	Photografi Koreksi (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	1.500.000,00	18.000.000,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelengkapan tugas				223.200.000,00
	Salah satu (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	4.200.000,00	50.400.000,00
	Salah satu (1 Orang x 12 Bulan)	12	OR	4.200.000,00	50.400.000,00
	Salah satu (1 Orang x 12 Bulan)	24	OR	1.500.000,00	36.000.000,00
	Salah satu (1 Orang x 12 Bulan)	24	OR	1.500.000,00	36.000.000,00



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				Jumlah	1.883.313.338,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p>  <p>MEZIAR KPNDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Terbilang, 02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN</p>  <p>H. H. ISWANDI NIP. 19710204 200604 1 018</p> </div> </div>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	470.828.334,00			
Triwulan II	Rp.	470.828.334,00			
Triwulan III	Rp.	470.828.334,00			
Triwulan IV	Rp.	470.828.334,00			
Jumlah	Rp.	1.883.313.338,00			

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[illegible]





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode	Program	Ekskusi	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
							I	II	III	IV	
014	Peningkatan Perikanan Bawak Tengg	1	Peningkatan Perikanan Bawak Tengg	INDRAGIRI HILIR	Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk	APRO	7	24.240.000,00	9	1.248.000,00	5.000.000,00
							1.256.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	5.000.000,00	
015	Peningkatan Rahan Logistik Kamb	1	Peningkatan Rahan Logistik Kamb	INDRAGIRI HILIR	Bahan Logistik 1 Tahun	APRO	5.247.500,00	3.377.500,00	3.377.500,00	13.380.000,00	
							35.646.000,00	43.846.000,00	43.846.000,00	161.000.000,00	
017	Peningkatan Mutu dan Keamanan	1	Peningkatan Mutu dan Keamanan	INDRAGIRI HILIR	Mutu Mutu Produk dan Mutu Mutu Logistik	APRO	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	372.079.000,00	
							93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	372.079.000,00	
018	Eksportir Koordinat dan Koordinat Keluar Beras	1	Eksportir Koordinat dan Koordinat Keluar Beras	INDRAGIRI HILIR	Perbaikan Mutu Mutu Beras	APRO	637.750,00	641.250,00	411.500,00	2.120.000.000,00	
							637.750,00	641.250,00	411.500,00	2.120.000.000,00	
019	Peningkatan Mutu dan Keamanan	1	Peningkatan Mutu dan Keamanan	INDRAGIRI HILIR	Perbaikan Mutu Mutu Beras	APRO	637.750,00	641.250,00	411.500,00	2.120.000.000,00	
							637.750,00	641.250,00	411.500,00	2.120.000.000,00	



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis	Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Tingkat Risetnya (kuantitatif)	Sumber Data	Terdapat					Jumlah
							I	II	III	IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				INDRAGIRI HILIR	5	APRO					22=7+4+9+10	
(Lampiran 1) - RESERVAIR												
22.			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	INDRAGIRI HILIR	62.700.000	APRO	68.745.800,00	13.745.800,00	68.745.800,00	68.745.800,00	275.000.000,00	
012.			Pemeliharaan Standar Kesehatan (Rendahnya Kesehatan)	INDRAGIRI HILIR		APRO						
25.			Program Pengabdian, Peningkatan Kemampuan, dan Keterampilan Masyarakat (Rendahnya Kesehatan)	INDRAGIRI HILIR		APRO						
011.			Peningkatan Rumah Sakit (Rendahnya Kesehatan)	INDRAGIRI HILIR		APRO						
01E			Pengabdian Masyarakat (Rendahnya Kesehatan)	INDRAGIRI HILIR		APRO						
01F			Pengabdian Masyarakat (Rendahnya Kesehatan)	INDRAGIRI HILIR		APRO						
022.			Pengabdian Masyarakat (Rendahnya Kesehatan)	INDRAGIRI HILIR		APRO						



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program	Anggaran	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Luasan/Barang)	Sumber Dana	Terdapat				Jumlah
						I	II	III	IV	
11.	229	Pembelajaran Berbasis Rantai Sakti (SAR) Model Regional	INDONESIA	5	DAL	833.229.000,00	1.666.813.299,1	49.993.145,06	10	2.549.660.598,06
		Program Pembelajaran Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD	INDONESIA	5	DAL	375.590.000,00	174.700.000,00	10.000.000,00	10	1.540.290.000,00
		Pelayanan	INDONESIA	5	DAL	375.590.000,00	174.700.000,00	10.000.000,00	10	1.540.290.000,00
						2.118.930.384,00	1.496.050.069,00	1.094.496.645,06	1.031.100,00	7.393.598.198,06

Tembahan, 02 Januari 2018  
PENGUNA AMERAN

H. H. ISWANDI  
NIP. 0710204 200604 1 008

Mengesahkan  
PEMBAK PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MIZUAR EFENDI, SH  
NIP. 19631231 199503 1 009

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 1

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD 1.01.02.1.01.02.03.01.001.5.2	Formulir DPA-SKPD 2.2.1		
	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		800 Lembar		
Masukan	JUMLAH DANA		4.200.000,00		
Keluaran	Tersedianya Dana Surat Menyurat dalam Kegiatan RSUD Tengku Sulung		Materai 3000 dan Materai 6000		
Hasil	Tersedianya kegiatan Surat Menyurat		200 lembar Materai 3000 dan 600 Lembar Materai 6000		
Kelompok Satuan Kegiatan : Bagian Administrasi Kantor					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
1	2	Volume	Satuan	Harga satuan	3 = (2 x 5)
S.2.	BELANJA LANGSUNG				4.200.000,00
S.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				4.200.000,00
S.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.200.000,00
S.2.2.01.04.	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya				4.200.000,00
	Materai 6000	600,00	Lembar	6.000,00	3.600.000,00
	Materai 3000	200,00	Lembar	3.000,00	600.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>4.200.000,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PEMERINTAH DAERAH</p> <p><b>MIZUAR EPENDI, SH</b> NIP. 19631231 199503 1 009</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Tembusan, 02 Januari 2018</p> <p>PENGUNA ANGGARAN</p> <p><b>dr. H. ISWANDI</b> NIP. 19710204 200604 1 008</p> </div> </div>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp. 840.000,00				
Triwulan II	Rp. 1.260.000,00				
Triwulan III	Rp. 1.260.000,00				
Triwulan IV	Rp. 840.000,00				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.200.000,00</b>				



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 1

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Nº DPA SKPD</b> 1.01.02.1.01.02.03.01.002.5.2	<b>Formulir</b> DPA-SKPD 2.2.1		
	<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SÜLUNG					
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		
Masukan	JUMLAH DANA		52.000.000,00		
Keluaran	Tersedianya Dana Untuk Komunikasi dan Listrik		Telpon, Listrik dan Jaringan Internet		
Hasil	Terlaksananya kegiatan Jasa Telpon dan Listrik di Rumah Sakit		Telpon, Listrik dan Jaringan Internet Selama 1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Administrasi Kantor					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung</b> <b>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
S.2.	BELANJA LANGSUNG				52.000.000,00
S.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				52.000.000,00
S.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				52.000.000,00
S.2.2.03.01.	Belanja telepon				3.600.000,00
	Telpon Rumah Sakit	12,00	Bulan	300.000,00	3.600.000,00
S.2.2.03.03.	Belanja Listrik				42.000.000,00
	Listrik Rumah Sakit	12,00	Bulan	3.500.000,00	42.000.000,00
S.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimil/internet				6.400.000,00
	Pembayaran Jaringan Internet	1,00	Tahun	6.400.000,00	6.400.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>52.000.000,00</b>
Mengesahkan <b>PEJABAT PEMERINTAH DAERAH</b>  <b>MIZUAR EPENDI, SH</b> NIP. 19631231 199503 1 009					
Tembuslahan, 02 Januari 2018 <b>PENGUNA ANGGARAN</b>  <b>dr. H. ISWANDI</b> NIP. 19710204 200604 1 008					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	12.810.000,00			
Triwulan II	Rp.	13.170.000,00			
Triwulan III	Rp.	13.170.000,00			
Triwulan IV	Rp.	12.850.000,00			
Jumlah	Rp.	52.000.000,00			





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

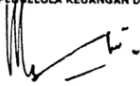
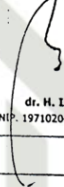
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					26.905.000,00
<p>Mengesahkan</p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p>  <p><b>MIZUAR EPENDI, SH</b> NIP. 19631231 199503 1 009</p>					
<p>Tembilahan, 02 Januari 2018</p> <p><b>PENGUNA ANGGARAN</b></p>  <p><b>dr. H. ISWANDI</b> NIP. 19710204 200604 1 008</p>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	6.726.000,00			
Triwulan II	Rp.	6.726.000,00			
Triwulan III	Rp.	6.726.000,00			
Triwulan IV	Rp.	6.727.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.905.000,00</b>			



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


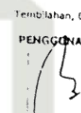
Halaman : 1

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	1.01.02.1.01.02.03.01.011.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b>					
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGI SULLUNG Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.011. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program	Program Pelayanan Administrasi Kantor		100%		
Masukan	JUMLAH DANA		10.000.000,00		
Keluaran	Tersedianya Dana untuk Kegiatan Penggandaan dan Cetak		Foto Copy dan Cetak		
Hasil	Tersedianya Kegiatan Fotocopy dan Cetak		Fotocopy dan Cetak 1 tahun		
Kelompok Saran Kegiatan : Bagian Administrasi Kantor					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung</b>					
<b>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
1	2	Volume	Satuan	Harga satuan	6 = (3 x 5)
3	4	5			
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				10.000.000,00
5.2.2.	<b>BELANJA BAHAN DAN JASA</b>				10.000.000,00
5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				10.000.000,00
5.2.2.06.01.	<b>Belanja cetak</b>				10.000.000,00
	Cetak Map Rumah Sakit	150.00	Lembar	10.000,00	1.500.000,00
	Cetak Status Pasien	400.00	Buat	10.000,00	4.000.000,00
5.2.2.06.02.	<b>Belanja Penggandaan</b>				4.500.000,00
	Fotocopy	18.000.00	Lembar	250,00	4.500.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>10.000.000,00</b>
Mengetahui PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  <b>MIZUAR EPENDI, SH</b> NIP. 19631231 199503 1 009					
Tembaklah, 02 Januari 2018 PENGANTAR ANGGARAN  <b>dr. H. ISWANDI</b> NIP. 19710204 200604 1 008					
<b>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</b>					
Triwulan I	Rp. 2.274.000,00				
Triwulan II	Rp. 2.724.000,00				
Triwulan III	Rp. 2.724.000,00				
Triwulan IV	Rp. 2.278.000,00				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 10.000.000,00</b>				



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD 1.01.02.1.01.02.03.01.013.5.2	Formulir DPA-SKPD 2.2.1		
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN :	1.01.02. - KESEHATAN				
ORGANISASI :	1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG				
Program :	1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan :	1.01.1.01.02.03.01.013. - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Waktu Pelaksanaan :	1 Tahun				
Lokasi Kegiatan :	INDRAGIRI HILIR				
Sumber Dana :	APBD,				
743000					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Taripet Kinerja		
Capaian Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Masukan	JUMLAH DANA		100%		
Keluaran	Tersedianya Anggaran Pengadaan Peralatan Kantor		24.240.000,00		
Hasil	Tersedianya Kegiatan Peralatan Kantor		Peralatan Kantor		
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Bagian Administrasi Rumah Sakit		Komputer PC, Meja dan Kursi		
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
S.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				24.240.000,00
S.2.1.	<b>BELANJA PERAWAI</b>				1.440.000,00
S.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>				1.440.000,00
S.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 Orang x 1 Kegiatan)	1.00	OK	300.000,00	300.000,00
S.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (2 Orang x 1 Kegiatan)	3.00	OK	300.000,00	900.000,00
S.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 1 Bulan)	1.00	OK	240.000,00	240.000,00
S.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>				22.800.000,00
S.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>				22.800.000,00
S.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book / Pengadaan Laptop	3.00	Unit	7.600.000,00	22.800.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>24.240.000,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p> </div> <div> <p>Tembilahan, 02 Januari 2018</p> <p>PENGKOTORA ANGGARAN</p>  <p>dr. H. ISWANDI NIP. 19710204 200604 1 008</p> </div> </div>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	24.240.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>24.240.000,00</b>		





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 1

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b> 1.01.02.1.01.02.03.01.014.5.2		<b>Formulir</b> DPA-SKPD 2.2.1	
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN					
ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULLUNG					
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.014. - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun					
Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana : APBD,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan		
Masukan	JUMLAH DANA		5.000.000,00		
Keluaran	Tersedianya Kegiatan/Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun		
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Peralatan Rumah Tangga		Alat-alat Rumah Tangga 1 Tahun		
Kategori Pokok Sasaran Kegiatan : Bagian Administrasi Kantor					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
1	2	Volume	Satuan	Harga satuan	6 = (3 x 5)
S.2.	BELANJA LANGSUNG				5.000.000,00
S.2.2.	BELANJA BAKUANG DAN JASA				5.000.000,00
S.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis				5.000.000,00
S.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				5.000.000,00
	Pembersih pembersih vital	80.00	Botol	17.000,00	1.360.000,00
	Pembersih Peralatan Porsitak	80.00	Botol	20.000,00	1.600.000,00
	Pembersih Lantai Super pel	60.00	Botol	17.000,00	1.020.000,00
	Pembersih Lantai SDS	51.00	Botol	20.000,00	1.020.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>5.000.000,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Mengesahkan</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">MIZUAR EPENDI, S.Pi NIP. 19631231 199503 1 009</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Tembilahan, 02 Januari 2018</p> <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;">H. H. ISWANDI NIP. 19710204 200604 1 003</p> </div> </div>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp. 1.256.000,00				
Triwulan II	Rp. 1.248.000,00				
Triwulan III	Rp. 1.248.000,00				
Triwulan IV	Rp. 1.248.000,00				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.000.000,00</b>				



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 1

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>		
	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	1.01.02.1.01.02.03.01.016.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b>					
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG					
Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.016. - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan		
Keluaran	JUMLAH DANA		15.800.000,00		
Keluaran	Tersedianya Anggaran untuk Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik 1 Tahun		
Hasil	Tersedianya Belanja Logistik Kantor		BBM, Bahan Pelumas dan Air Galon		
Kelompok Sasaran Kegiatan	Bagian Administrasi Kantor				
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung</b>					
<b>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pengalokasian			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
S.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>15.800.000,00</b>
S.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>15.800.000,00</b>
S.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Harian</b>				<b>14.000.000,00</b>
S.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				12.150.000,00
	BBM Solar	960,00	LB	7.500,00	7.200.000,00
	BBM Solar Amalindo	480,00	LB	7.500,00	3.600.000,00
	BBM Premium Masi Rumpit	180,00	liter	7.500,00	1.350.000,00
S.2.2.01.23.	Belanja Bahan Pelumas				1.850.000,00
	Minyak Oli Grent	2,00	Kaleng	925.000,00	1.850.000,00
S.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>1.800.000,00</b>
S.2.2.02.07.	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga				1.800.000,00
	Air Galon (10 Galon x 12 Quoin)	120,00	Gal	15.000,00	1.800.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>15.800.000,00</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</b>					
Triwulan I	Rp. 5.247.500,00				
Triwulan II	Rp. 3.577.500,00				
Triwulan III	Rp. 3.577.500,00				
Triwulan IV	Rp. 3.397.500,00				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 15.800.000,00</b>				





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD 1.01.02.1.01.02.03.01.017.5.2		Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN :	1.01.02 - KESEHATAN				
ORGANISASI :	1.01.02.03 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULLING				
Program :	1.01.1.01.02.03.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan :	1.01.1.01.02.03.01.017 - Penyediaan Makanan dan Minuman				
Waktu Pelaksanaan :	1 Tahun				
Lokasi Kegiatan :	INDRAGIRI HILIR				
Sumber Dana :	APROD				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan		
Masukan	Jumlah Dana		161.000.000,00		
Keluaran	Terlaksananya Anggaran Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan Minum Pasien dan Makan Minum Kegiatan		
Hasil	Terlaksananya Penyediaan Makanan Minum di Rumah Sakit		Makan Minum Pasien dan makan Minum Kegiatan 1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Administrasi Kantor					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah 6 = (3 x 5)
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				161.000.000,00
5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				161.000.000,00
5.2.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				161.000.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan (dan minuman) kegiatan				72.000.000,00
	Makan Minum Tamu (10 Orang x 12 Kali)	120,00	OK	30.000,00	3.600.000,00
	Makan Minum Rapat (30 Orang x 3 kali x 12 Kali)	1.080,00	OK	30.000,00	32.400.000,00
	Makan Minum Petugas Kecamatan (20 Orang x 2 kali x 30 Kali)	1.200,00	OK	30.000,00	36.000.000,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pasien				89.000.000,00
	Susu	25,00	Kanang	250.000,00	6.250.000,00
	Beras	60,00	Kanang	300.000,00	18.000.000,00
	Tepung	15,00	Kanang	200.000,00	3.000.000,00
	Singkong	40,00	Kg	15.000,00	600.000,00
	Kacang Mada	50,00	Botol	25.000,00	1.250.000,00
	Kacang Asin	50,00	Botol	25.000,00	1.250.000,00
	Saus	50,00	Botol	15.000,00	750.000,00
	Tepung Bumbu	60,00	Bungkus	10.000,00	600.000,00
	Bawang Merah	60,00	Kg	35.000,00	2.100.000,00
	Bawang Putih	50,00	Kg	30.000,00	1.500.000,00
	Garam	25,00	Bungkus	10.000,00	250.000,00
	Gula	50,00	Kg	20.000,00	1.000.000,00
	Teh	50,00	Kotak	10.000,00	500.000,00
	Minyak Tanah	23,00	Liter	18.000,00	414.000,00
	Tanah Gas 3 kg	50,00	Ledang	45.000,00	2.250.000,00
	Clayung Ayam	72,00	Kg	55.000,00	3.960.000,00
	Itan	50,00	Kg	45.000,00	2.250.000,00
	Udang	40,00	Kg	55.000,00	2.200.000,00
	Hati Ayam	25,00	Kg	23.000,00	575.000,00
	Bakso	40,00	Bungkus	20.000,00	800.000,00
	Tahu	336,00	Buah	3.000,00	1.008.000,00
	Tamper	336,00	Buah	5.000,00	1.680.000,00
	Kentang	304,00	Kg	25.000,00	7.600.000,00
	Wortel	48,00	Kg	25.000,00	1.200.000,00
	Buncis	48,00	Kg	15.000,00	720.000,00
	Kacang Panjang	40,00	Kg	10.000,00	400.000,00
	Lada Hitam	30,00	Kg	10.000,00	300.000,00
	Lada Putih	30,00	Kg	10.000,00	300.000,00
	Semer Paku	30,00	Kg	10.000,00	300.000,00
	Meranti	35,00	Kg	15.000,00	525.000,00
	Cabe Merah	50,00	Kg	20.000,00	1.000.000,00
	Cabe Merah	50,00	Kg	20.000,00	1.000.000,00





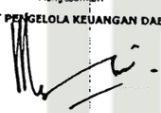
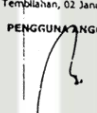
### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Ukr Jati	40,00	Kg	15.000,00	600.000,00
	Keladi	35,00	Kg	20.000,00	700.000,00
	Takur Ayam	50,00	Papan	80.000,00	4.000.000,00
	Takur Payuh	25,00	Papan	40.000,00	1.000.000,00
	Bakur Kahu	80,00	Bungkus	36.000,00	2.880.000,00
	Apur-apur	80,00	Bungkus	15.000,00	1.200.000,00
	Margam	60,00	Bungkus	30.000,00	1.800.000,00
	Roti Tawar	80,00	Bungkus	15.000,00	1.200.000,00
	Minyak Goreng	50,00	Liter	25.000,00	1.250.000,00
				Jumlah	161.000.000,00

<p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p>  <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199303 1 009</p>		<p>Tembilang, 02 Januari 2018</p> <p>PENGUNA BANGGARAN</p>  <p>dr. H. ISWANDI NIP. 19710204 200604 1 008</p>
---	--	--

Rencana Penarikan Dana per Triwulan	
Triwulan I	Rp. 36.648.000,00
Triwulan II	Rp. 43.848.000,00
Triwulan III	Rp. 43.848.000,00
Triwulan IV	Rp. 36.656.000,00
Jumlah	Rp. 161.000.000,00



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 1

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b> 1.01.02.1.01.02.03.01.018.5.2	<b>Formulir</b> DPA-SKPD 2.2.1		
	<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>				
URUSAN PEMERINTAHAN :	1.01.02. - KESEHATAN				
ORGANISASI :	1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG				
Program :	1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan :	1.01.1.01.02.03.01.018. - Rapat-koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				
Waktu Pelaksanaan :	1 Tahun				
Lokasi Kegiatan :	INDRAGIRI HILIR				
Sumber Dana :	APBD				
<b>Indikator &amp; Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan		
Hasil	JUMLAH DANA		372.079.000,00		
Keluaran	Tersedianya Anggaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah		Perjalanan Keluar Daerah		
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Keluar Daerah		Perjalanan Dinas Ke Jakarta, Pekanbaru dan Terbilang selama 1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Administrasi Kantor					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung</b> <b>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				372.079.000,00
5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				372.079.000,00
5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				372.079.000,00
5.2.2.15.02.	<b>Belanja perjalanan dinas luar daerah</b>				372.079.000,00
	<b>c. Tambahan</b>				
	<b>Eselon III/Golongan IV</b>				
	Uang Honor (1 Orang x 32 Kali x 2 Hari)	64,00	OKM	530.000,00	33.920.000,00
	Biaya Penginapan (1 Orang x 32 Kali x 1 Malam)	32,00	OKM	290.000,00	9.280.000,00
	Biaya Transportasi (1 Orang x 32 Kali)	32,00	OK	200.000,00	6.400.000,00
	<b>Eselon IV/Golongan III</b>				
	Uang Honor (10 Orang x 11 Kali x 2 Hari)	220,00	OKM	455.000,00	100.100.000,00
	Biaya Penginapan (10 Orang x 11 Kali x 1 Malam)	110,00	OKM	260.000,00	28.600.000,00
	Biaya Transportasi (10 Orang x 11 Kali)	110,00	OK	200.000,00	22.000.000,00
	<b>Golongan IV/Umum ASN</b>				
	Uang Honor (4 Orang x 10 Kali x 2 Hari)	80,00	OKM	375.000,00	30.000.000,00
	Biaya Penginapan (4 Orang x 10 Kali x 1 Malam)	40,00	OKM	250.000,00	10.000.000,00
	Biaya Transportasi (4 Orang x 10 Kali)	40,00	OK	200.000,00	8.000.000,00
	<b>d. Peralihan</b>				
	<b>Eselon III/Golongan IV</b>				
	Uang Honor (1 Orang x 4 Kali x 3 Hari) (1 Orang x 4 Kali x 3 Hari)	12,00	OKM	840.000,00	10.080.000,00
	Biaya Penginapan (1 Orang x 4 Kali x 2 Malam) (1 Orang x 4 Kali x 2 Malam)	8,00	OKM	650.000,00	5.200.000,00
	Biaya Transportasi (1 Orang x 4 Kali) (1 Orang x 4 Kali)	4,00	OK	601.000,00	2.404.000,00
	<b>Eselon IV/Golongan III</b>				
	Uang Honor (3 Orang x 2 Kali x 3 Hari) (5 Orang x 2 Kali x 3 Hari)	30,00	OKM	790.000,00	23.700.000,00
	Biaya Penginapan (5 Orang x 2 Kali x 2 Malam) (5 Orang x 2 Kali x 2 Malam)	20,00	OKM	550.000,00	11.000.000,00
	Biaya Transportasi (5 Orang x 2 Kali) (5 Orang x 2 Kali)	10,00	OK	540.000,00	5.400.000,00
	<b>Golongan II/Golongan Non ASN</b>				
	Uang Honor (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari) (1 Orang x 1 Kali x 3 Hari)	3,00	OKM	715.000,00	2.145.000,00
	Biaya Penginapan (1 Orang x 1 Kali x 2 Malam) (1 Orang x 1 Kali x 2 Malam)	2,00	OKM	400.000,00	800.000,00
	Biaya Transportasi (1 Orang x 1 Kali) (1 Orang x 1 Kali)	1,00	OK	540.000,00	540.000,00
	<b>e. Jatah</b>				
	<b>Eselon III/Golongan IV</b>				
	Uang Honor (1 Orang x 3 Kali x 4 Hari) (1 Orang x 3 Kali x 4 Hari)	12,00	OKM	1.000.000,00	12.000.000,00
	Biaya Penginapan (1 Orang x 3 Kali x 3 Malam) (1 Orang x 3 Kali x 3 Malam)	9,00	OKM	750.000,00	6.750.000,00
	Biaya Transportasi (1 Orang x 3 Kali) (1 Orang x 3 Kali)	3,00	OK	3.000.000,00	9.000.000,00



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang harian ( 4 Orang x 1 kali x 4 hari ) ( 4 Orang x 1 kali x 4 hari )	16.00	OKH	965.000,00	15.440.000,00
	Biaya Pengharian ( 4 Orang x 1 kali x 3 malam ) ( 4 Orang x 1 kali x 3 malam )	12.00	OKH	610.000,00	7.320.000,00
	Biaya Transportasi ( 3 Orang x 2 kali ) ( 4 Orang x 1 kali )	4.00	OK	3.000.000,00	12.000.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>372.079.000,00</b>

Mengesahkan


**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**



**MIZUAR EPENDI, SH**  
NIP. 19631231 199503 1 009

Tembilahan, 02 Januari 2018

**PENGGUNA ANGGARAN**



**H. H. ISWANDI**  
NIP. 19710204 200604 1 008

Rencana Penarikan Dana per Trivulan	
Trivulan I	Rp. 93.000.000,00
Trivulan II	Rp. 93.000.000,00
Trivulan III	Rp. 93.000.000,00
Trivulan IV	Rp. 93.079.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 372.079.000,00</b>





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 1

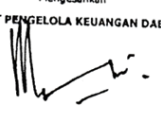

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b> 1.01.02.1.01.02.03.01.019.5.2	<b>Formulir</b> DPA-SKPD 2.2.1		
	<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG					
Program : 1.01.1.01.02.03.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.019 - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan		
Misalkan	Jumlah Dana		2.120.000.000,00		
Keluaran	Tersedianya Anggaran Jasa Tenaga Pendukung Administrasi		Tenaga Honor 1 Tahun		
Hasil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Honor		Tenaga Dokter, Spesialis dan Dokter Umum, Tenaga Honor selama 1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Administrasi Kontor					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung</b> <b>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	
S.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				2.120.000.000,00
S.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				2.120.000.000,00
S.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				500.000.000,00
S.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				4.550.000,00
	Jasa Tenaga Laundry (1 Orang x 7 Bulan)	7,00	00	650.000,00	4.550.000,00
S.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga : Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				25.550.000,00
	Tenaga Operator (3 Orang x 5 Bulan)	15,00	00	800.000,00	12.000.000,00
	Tenaga Tukang Kebun (2 Orang x 6 Bulan)	12,00	00	750.000,00	9.000.000,00
	Tenaga Tukang (1 Orang x 7 Bulan)	7,00	00	650.000,00	4.550.000,00
S.2.2.03.23.	Belanja Jasa Sewa-Konsumen				11.700.000,00
	Jasa Tenaga Sengam (2 Orang x 6 Bulan)	18,00	00	650.000,00	11.700.000,00
S.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pengemudi				4.900.000,00
	Jasa Tenaga Suci Ambulance (1 Orang x 7 Bulan)	7,00	00	700.000,00	4.900.000,00
S.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pegawai Administrasi Perkantoran				70.500.000,00
	Jasa Tenaga ST Administrasi Perkantoran (9 Orang x 5 Bulan)	45,00	00	900.000,00	40.500.000,00
	Jasa Tenaga ST Administrasi Perkantoran (8 Orang x 5 Bulan)	40,00	00	750.000,00	30.000.000,00
S.2.2.03.33.	Belanja Jasa Pegawai Kesehatan				382.800.000,00
	Jasa Tenaga Dokter Umum (2 Orang x 6 Bulan)	12,00		5.000.000,00	60.000.000,00
	Jasa Tenaga Dokter Gigi (1 Orang x 6 Bulan)	6,00	00	5.000.000,00	30.000.000,00
	Jasa Tenaga ST Kesehatan (3 Orang x 6 Bulan)	18,00	00	900.000,00	16.200.000,00
	Jasa Tenaga DIII Kesehatan (2 Orang x 12 Bulan)	24,00	00	750.000,00	18.000.000,00
	Jasa Tenaga STK (1 Orang x 6 Bulan)	6,00	00	800.000,00	4.800.000,00
	Jasa Tenaga D III Kesehatan (17 Orang x 6 Bulan)	282,00	00	500.000,00	251.800.000,00
S.2.2.26.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Manasember				1.620.000.000,00
S.2.2.26.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli				1.620.000.000,00
	Tenaga Dokter spesialis Penyakit Dalam (1 Orang x 12 Bulan)	12,00	Orang	35.000.000,00	420.000.000,00
	Tenaga Dokter Spesialis Kandungan (1 Orang x 12 Bulan)	12,00	Orang	35.000.000,00	420.000.000,00
	Tenaga Dokter Spesialis Anak (1 Orang x 12 Bulan)	12,00	Orang	35.000.000,00	420.000.000,00
	Tenaga Dokter Spesialis Anestesi (1 Orang x 12 Bulan)	12,00	Orang	30.000.000,00	360.000.000,00



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 2


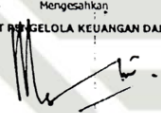
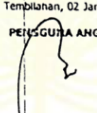
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>Jumlah</b>					<b>2.120.000.000,00</b>
<p>Mengesahkan</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b></p>  <p><b>MIZUAR EPENDI, SH</b> NIP. 19631231 199503 1 009</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Tembilahan, 02 Januari 2018</p> <p><b>PENGUNA ANGGARAN</b></p>  <p><b>dr. H. ISWANDI</b> NIP. 19710204 200604 1 008</p> </div> </div>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	637.750.000,00			
Triwulan II	Rp.	641.250.000,00			
Triwulan III	Rp.	411.500.000,00			
Triwulan IV	Rp.	409.500.000,00			
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.120.000.000,00</b>		





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b> 1.01.02.1.01.02.03.23.012.5.2		<b>Formulir</b> DPA-SKPD 2.2.1	
		<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018</b>			
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULLUNG Program : 1.01.02.1.01.02.03.23 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.23.012 - Penyusunan Standar Kesehatan (Dana Alokasi Kesehatan) Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Output Program	Penyusunan Standar Kesehatan (Dana Alokasi Khusus)			12 Bulan	
Hasil	Tersedianya Anggaran Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit			275.000.000,00	
Selatan	Tersedianya Dana			Rp275000000	
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit			Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	
Kelompok Kegiatan : Mutu Pelayanan Rumah Sakit					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Volume	Setoran	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
S.2.	BELANJA LANGSUNG				275.000.000,00
S.2.2.	BELANJA BARANG/DIAR JASA				275.000.000,00
S.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				275.000.000,00
S.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis Akreditasi Rumah Sakit	1.00	Kegiatan	275.000.000,00	275.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>275.000.000,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">                         Mengesahkan  <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>    <b>MIZUAR EPENDI, SH</b>                          NIP. 19631231 199503 1 009                     </div> <div style="text-align: center;">                         Tembilang, 02 Januari 2018  <b>PEKESGUA ANGGARAN</b>    <b>dr. Hj. ISWANDI</b>                          NIP. 19770204 200604 1 000                     </div> </div>					
<b>rencana Penarikan Dana per Triwulan</b>					
Triwulan I	Rp. 68.749.800,00				
Triwulan II	Rp. 68.749.800,00				
Triwulan III	Rp. 68.749.800,00				
Triwulan IV	Rp. 68.750.600,00				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 275.000.000,00</b>				





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 1

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b> 1.01.02.1.01.02.03.26.018.5.2	<b>Formulir</b> DPA-SKPD 2.2.1		
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG Program : 1.01.02.1.01.02.03.26 - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Kurum Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.018 - Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program	Terlaksananya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit		12 Bulan		
Masukan	Jumlah Dana		75.000.000,00		
Keluaran	Tersedianya Dana Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit				
Hasil	Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit		Bahan Habis Pakai Material Kesehatan		
Kelompok Sasaran/Kegiatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		Bahan Habis Pakai Material Kesehatan		
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
1	2	Volume	Satuan	Harga satuan	6 = (3 x 5)
S.2	BELANJA LANGSUNG				75.000.000,00
S.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				75.000.000,00
S.2.2.01	Belanja Bahan Habis Pakai				75.000.000,00
S.2.2.01.09	Belanja Bahan habis pakai Material Kesehatan				75.000.000,00
	Bahan Habis Pakai Material Kesehatan	1.00	Tahun	75.000.000,00	75.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>75.000.000,00</b>
Mengesahkan PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  HIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009					
Tembilang, 02 Januari 2018 PENGGUNA ANGGARAN  Dr. H. ISWANDI NIP. 6710204 200604 1 008					
<b>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</b>					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	75.000.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>75.000.000,00</b>			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NO DPA SKPD</b> 1.01.02.1.01.02.03.26.019.5.2	Halaman : 1 <b>Formulir</b> <b>DPA-SKPD 2.2.1</b>		
	<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG Program : 1.01.02.1.01.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rum Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.019. - Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Tertindakannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Peru-peru/Rumah Sakit Mata	12 Bulan			
Masukan	JUMLAH DANA				
Keluaran	Tersedianya Anggaran/Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	103.073.600,00			
Hasil	Tertindakannya Kegiatan/Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Obat-obat Rumah Sakit			
		Obat-obatan Rumah Sakit 1 Tahun			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung</b> <b>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan		Jumlah	
1	2	Volume	Satuan	Harga satuan	
3	4	5	6 = (3 x 5)		
S.2.	BELANJA LANGSUNG				103.073.600,00
S.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				103.073.600,00
S.2.2.02.	Belanja Bahan/Hutanol				103.073.600,00
S.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan				103.073.600,00
	Obat-obatan Rumah Sakit	1.00	Kegiatan	103.073.600,00	103.073.600,00
Jumlah					103.073.600,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Mengesahkan</p> <p style="text-align: center;">KEPABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <div style="text-align: center;">   <b>MIZUAR EPENDI, SH</b>            NIP. 19631231 199503 1 009         </div> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Tembahan, 02 Januari 2018</p> <p style="text-align: center;">PENGUNGGAH ANGGARAN</p> <div style="text-align: center;">   <b>Dr. H. ISWANDI</b>            NIP. 19710204 200604 1 008         </div> </div> </div>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	103.073.600,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	103.073.600,00			





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman : 1




	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>	<b>NO DPA SKPD</b>	<b>Formulir</b>	
	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	1.01.02.1.01.02.03.26.023.5.2	<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>	
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b>				
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>				
URUSAN PEMERINTAHAN :	1.01.02 - KESEHATAN			
ORGANISASI :	1.01.02.03 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG			
Program :	1.01.02.1.01.02.03.26 - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rum.			
Kegiatan :	1.01.02.1.01.02.03.26.023 - Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit			
Waktu Pelaksanaan :	1 Tahun			
Lokasi Kegiatan :	INDRAGIRI HILIR			
Sumber Dana :	APBD,			
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Program	Tertaksananya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Pengobatan/Rumah Sakit Mata		12 Bulan	
Masukan	JUMLAH DANA		100.000.000,00	
Keluaran	Tersedianya Anggaran Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit		Pengisian Ulang Tabung Oksigen	
Hasil	Tertaksananya Pengadaan Bahan-bahan Rumah Sakit		Pengisian Ulang Tabung Oksigen 1 Tahun	
Kelompok Sasaran / Kegiatan :	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung</b>				
<b>Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan		
1	2	Volume	Satuan   Harga satuan	
3	4	5	6 = (3 x 5)	
S.2.	BELANJA LANGSUNG			100.000.000,00
S.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA			100.000.000,00
S.2.2.01.	Belanja Bahan Pakul Habis			100.000.000,00
S.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas			100.000.000,00
	Pengisian Tabung Oksigen Besar (10 Tabung x 12) (Tabung Besar 10 Tabung x 2 x 12 Bulan)	240,00	TD	300.000,00
	Pengisian Tabung Oksigen Kecil (Pengisian Tabung Kecil 7 Tabung x 2 x 12 Bulan)	168,00	TD	165.000,00
	Anggaran yang tidak bisa dibebankan	1,00	Kegiatan	280.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>100.000.000,00</b>
Mengesahkan		Tembilahan, 02 Januari 2018		
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		PENGGUNA ANGGARAN		
 <b>MIZUAR EPENDI, SH</b> NIP. 19631231 199503 1 009		 <b>dr. H. ISWANDI</b> NIP. 19710204 200604 1 068		
<b>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</b>				
Triwulan I	Rp. 24.900.000,00			
Triwulan II	Rp. 30.000.000,00			
Triwulan III	Rp. 24.000.000,00			
Triwulan IV	Rp. 21.100.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 100.000.000,00</b>			





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

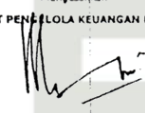
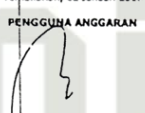
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD 1.01.02.1.01.02.03.26.029.5.2		Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018							
URUSAN PEMERINTAHAN :		1.01.02. - KESEHATAN					
ORGANISASI :		1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YENGI					
Program :		1.01.02.1.01.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Rumah Sakit/Rumah Sakit Jember/Rum					
Kegiatan :		1.01.02.1.01.02.03.26.029. - Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus/DAK)					
Waktu Pelaksanaan :		1 Tahun					
Lokasi Kegiatan :		INDRAGIRI HILIR					
Sumber Dana :		DAK					
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung							
Indikator		Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program :		Program Rehabilitasi Rumah Sakit ( Dana Alokasi Khusus/DAK )			1 Tahun		
Masukan :		Tersedianya Anggaran Untuk Pembangunan Gedung Rumah Sakit, Pengadaan Ambulance dan Alat-alat Kesehatan Dana Alokasi Khusus			2.549.660.598,06		
Keluaran :		JUMLAH DANA			Rp. 2.549.660.598,06		
Hasil :		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit, Pengadaan Ambulance dan Alat-alat Kesehatan Dana Alokasi Khusus			Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit, Pengadaan Ambulance dan Alat-alat Kesehatan Dana Alokasi Khusus		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembangunan Gedung Rumah Sakit, Pengadaan Ambulance dan Alat-alat Kesehatan							
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)		
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.549.660.598,06		
5.2.3.	BELANJA MODAL				2.549.660.598,06		
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan				2.549.660.598,06		
5.2.3.26.01.	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor				2.549.660.598,06		
	Pembangunan Gedung Bersik Darah (Dana Alokasi Khusus)	1.00	Kegiatan	1.367.967.253,00	1.367.967.253,00		
	Gedung Instalasi Farmasi (Pelayanan dan Gedung Farmasi) (Dana Alokasi Khusus)	1.00	Kegiatan	1.131.700.000,00	1.131.700.000,00		
	Pembangunan DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rogger)						
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Bersik Darah	1.00	Kegiatan	27.359.345,06	27.359.345,06		
	Pengawasan Gedung Instalasi Farmasi	1.00	Kegiatan	22.634.000,00	22.634.000,00		
	Jumlah				2.549.660.598,06		
Mengesahkan		Terbilang, 02 Januari 2018					
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		PENGGUNA ANGGARAN					
 MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009		 J. H. ISWANDI NIP. 19710204 200604 1 018					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan							
Triwulan I	Rp.	833.229.084,00					
Triwulan II	Rp.	1.666.438.169,00					
Triwulan III	Rp.	49.993.345,06					
Triwulan IV	Rp.						
Jumlah	Rp.	2.549.660.598,06					



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD 1.01.02.1 01.02.03.33.001.5.2		Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
<b>KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG Program : 1.01.02.1.01.02.03.33. - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.33.001. - Pelayanan Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HILIR Sumber Dana : APBD,					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit BLUD		12 Bulan		
Masukan	JUMLAH DANA		1.500.000.000,00		
Keluaran	Tersedianya Anggaran Kegiatan Pelayanan		Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai		
Hasil	Terlaksananya Pelayanan BLUD		Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai 1 Tahun		
Kategori Sasaran Kegiatan : Pelayanan BLUD					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
S.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				1.500.000.000,00
S.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				164.400.000,00
S.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD				164.400.000,00
S.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit				164.400.000,00
	Belanja Pegawai BLUD	1,00	Tahun	164.400.000,00	164.400.000,00
S.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				1.285.600.000,00
S.2.2.25.	Belanja Barang dan Jasa BLUD				1.285.600.000,00
S.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit				1.285.600.000,00
	Barang dan Jasa	1,00	Tahun	1.285.600.000,00	1.285.600.000,00
S.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>				50.000.000,00
S.2.3.32.	Belanja Modal BLUD				50.000.000,00
S.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit				50.000.000,00
	Belanja Aset Tidak Keras	1,00	Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>1.500.000.000,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Mengesahkan</p> <p>PEJABAT PENANGKULU KEUANGAN DAERAH</p>  <p>MIZUAR EPENDI, SH NIP. 19631231 199503 1 009</p> </div> <div> <p>Tembilahan, 02 Januari 2018</p> <p>PENGUNA ANGGARAN</p>  <p>dr. H. ISIWANDI NIP. 19710204 200604 1 008</p> </div> </div>					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	375.500.000,00			
Triwulan II	Rp.	374.700.000,00			
Triwulan III	Rp.	374.700.000,00			
Triwulan IV	Rp.	175.100.000,00			
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.500.000.000,00</b>		





# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

#### BAB I PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 49, tambahan Lembaga Negara Nomor 2754).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Propinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 km<sup>2</sup>, dari daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 km<sup>2</sup> (perairan umum 889 km<sup>2</sup> dan laut 6.318 km<sup>2</sup>), dengan batas-batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi), sebelah Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Format laporan keuangan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah. Periode pelaporan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran 2018. Laporan keuangan ini terdiri dari ;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD;
2. Laporan Operasional (LO) SKPD;
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD;
4. Neraca SKPD; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD.

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya Laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik,





# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami secara benar oleh para pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, harus dibuat catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari Laporan Keuangan, disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD dengan memuat penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca memuat informasi pelaksanaan APBD 2018 yang meliputi:

- a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- c. Kebijakan akuntansi yang penting
- d. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- e. Pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan informasi tambahan lainnya.

#### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada :

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta: milik UIN Suska Riau. Site: Idnamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua;

14. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 48 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 13. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Bab II Kebijakan Keuangan

Memuat kebijakan keuangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

#### Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah.

#### Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yaitu Laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca SKPD dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### Bab VI Penutup

Memuat uraian tentang permasalahan serta pemecahannya





# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

#### Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas berbantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Penyusunan APBD Tahun 2018 didasarkan pada pendekatan kinerja yang mengutamakan *output*, *outcome* dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, disiplin, adil, efisien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran sementara disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

#### Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran

Indikator pencapaian target kinerja APBD merupakan indikator kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan dan informasi tentang pencapaian efektifitas program dan kegiatan yang telah



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan yang tertuang dalam APBD. Indikator pencapaian target kinerja yang dimaksud adalah:

- Indikator capaian program (sasaran), tolak ukur kinerjanya berupa obyek sasaran program/kegiatan yang akan dicapai. Target kinerjanya ditampillkan dalam bentuk jumlah obyek sasaran program/kegiatan, yang mencerminkan jumlah yang akan dicapai dari suatu program/kegiatan.
- Indikator masukan (*input*), tolak ukur kinerjanya jumlah dana, SDM, dan peralatan yang digunakan. Target kinerjanya rupiah untuk jumlah dana, orang untuk SDM dan satuan untuk peralatan yang digunakan untuk mencapai suatu target.
- Indikator keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan dengan target kinerja berupa jumlah/volume sasaran yang dicapai.

Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari program/kegiatan, tolak ukur kinerjanya adalah manfaat dari terlaksananya kegiatan. Target kinerjanya ditunjukan dengan prosentase yang merupakan perbandingan antara capaian dengan jumlah objek sasaran program/kegiatan.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Perkembangan realisasi dan rencana kinerja keuangan RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>2.567.946.176,00</b>	<b>171,20</b>
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	2.567.946.176,00	171,20
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.500.000.000,00</b>	<b>2.567.946.176,00</b>	<b>171,20</b>

##### a. Realisasi Pendapatan Tahun 2018

Pendapatan Asli Daerah RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang tahun 2018 sebesar Rp. 2.567.946.176,00,-

##### b. Realisasi Belanja Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.854.810.938,00</b>	<b>6.549.036.269,00</b>	<b>95,54</b>
1.	Belanja Pegawai	1.883.313.338,00	1.573.755.137,00	83,56
2.	Belanja Barang	4.971.497.600,00	4.975.281.132,00	100,08
3.	Bunga	-	-	-
4.	Hibah	-	-	-
5.	Bantuan Sosial	-	-	-
<b>B</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.532.460.598,06</b>	<b>7.497.427.218,69</b>	<b>87,87</b>
1.	Tanah	-	-	-
2.	Peralatan & Mesin	5.932.800.000,00	5.167.021.656,69	87,09
3.	Gedung& Bangunan	2.549.660.598,06	2.287.764.562,00	89,73
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>C</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Belanja Tak Terduga	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>15.387.271.536,06</b>	<b>14.046.463.488</b>	<b>91,28</b>

##### 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

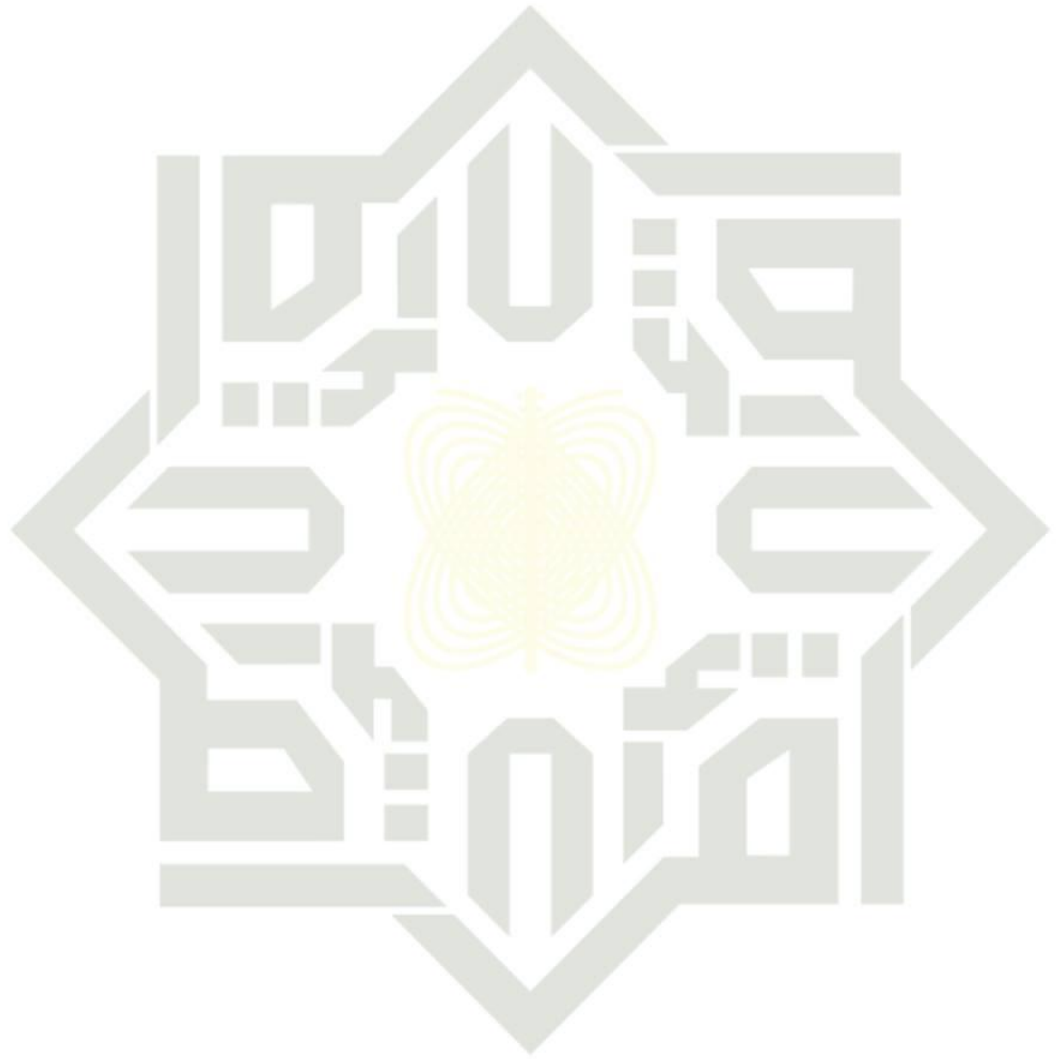
RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah



dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efisiensi dan penghematan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAB IV  
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam sistem dan prosedur akuntansi ini mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyajikan informasi:

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pengambilan keputusan; dan
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
  - 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan;
  - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
  - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
  - 4) dapat diverifikasi;
  - 5) mencerminkan kehati-hatian; dan
  - 6) mencakup semua hal yang material.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menggunakan pertimbangan yang memadai untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan yang memadai tersebut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
- c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b. Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:

#### 4.1. Entitas Akuntansi

RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan wewenang kepada PPK SKPD dan Bendaharawan Pengeluaran untuk mengelola administrasi keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya.

Bagian Keuangan RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku entitas pelaporan melakukan fungsi penganggaran, fungsi verifikasi, fungsi perbendaharaan dan fungsi akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa ;

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD;
2. Laporan Operasional (LO) SKPD;
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD;
4. Neraca SKPD; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD.

#### 4.2. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis Akrua untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam perhitungan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

#### 4.3. Pengakuan dan Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

##### 1. Akun Neraca. Akun Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Klasifikasi akun aset disajikan pada tabel berikut:

Kodefikasi	Uraian Akun
1	Aset
11	Aset Lancar
	Merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
111	Kas Digunakan untuk mencatat kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup antara lain: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD.
112	Investasi Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan hingga dua belas bulan yang bertujuan dalam rangka manajemen kas, yang artinya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Investasi Jangka Pendek mencakup antara lain Investasi Dalam Saham dan Investasi Dalam Obligasi.
113	Piutang Pendapatan Digunakan untuk mencatat piutang akan pendapatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain: Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah, Piutang Bantuan Keuangan, dan Piutang Hibah dan Piutang Pendapatan Lainnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

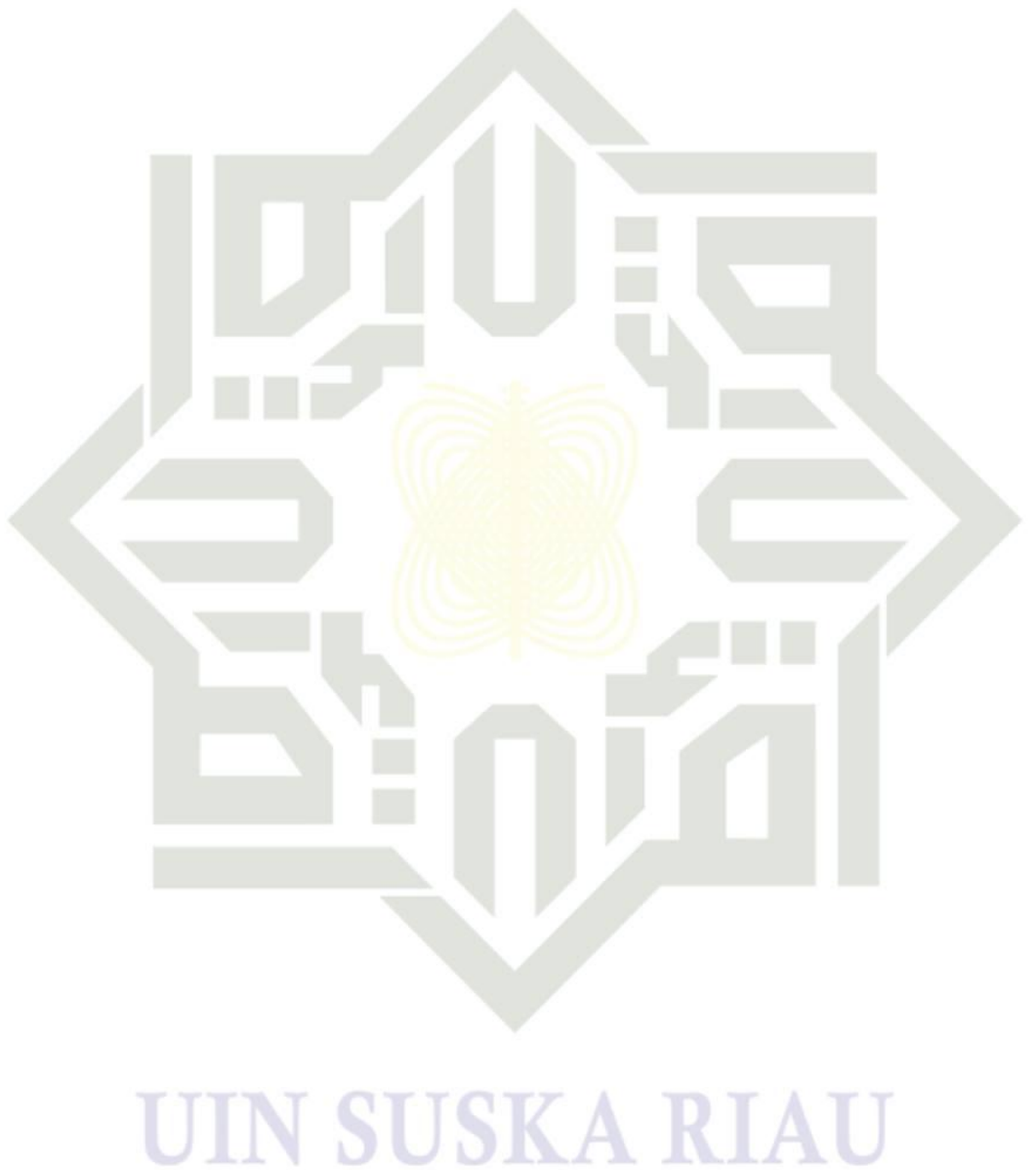
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

114	<p>Piutang Lainnya</p> <p>Digunakan untuk mencatat Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.</p>
115	<p>Penyisihan Piutang</p> <p>Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Penyisihan Piutang mencakup antara lain</p>
116	<p>Beban Dibayar Dimuka</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dibayarkan dimana pengeluaran tersebut belum menjadi beban pada tahun berjalan.</p>
117	<p>Persediaan</p> <p>Digunakan untuk mencatat persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk di dalamnya persediaan untuk diserahkan ke masyarakat dan/atau pihak ketiga. Persediaan mencakup antara lain: Persediaan Alat Tulis Kantor, Persediaan Alat Listrik, Persediaan Material/Bahan, Persediaan Benda Pos, Persediaan Bahan Bakar, dan Persediaan Bahan Makanan Pokok.</p>
199	<p>Aset Untuk Dikonsolidasikan</p> <p>Digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain RK SKPD.</p>
12	<p>Investasi Jangka Panjang</p> <p>Merupakan Aset non Lancar berupa Investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.</p>
121	<p>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</p> <p>Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang Non Permanen mencakup antara lain: Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Investasi dalam Obligasi, Investasi dalam Proyek Pembangunan, Dana Bergulir, dan Investasi Non Permanen Lainnya.</p>
122	<p>Investasi Jangka Panjang Permanen</p> <p>Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang Permanen mencakup antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13	<p><b>Aset Tetap</b></p> <p>Merupakan Aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.</p>
----	--



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kodefikasi	Uraian Akun
131	<p>Tanah</p> <p>Digunakan untuk mencatat kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang mencakup antara lain: Tanah Kantor, Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik, Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus, Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus, Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan, Tanah Sarana Sosial Panti Jompo, Tanah Sarana Umum Terminal, Tanah Sarana Umum Dermaga, Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis, Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan, Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan, Tanah Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Tanah Sarana Umum Taman, Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat, Tanah Sarana Umum Ibadah, Tanah Sarana Stadion Olahraga, Tanah Perumahan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Tanah Perikanan, Tanah Peternakan, Tanah Perkampungan, Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku.</p>
132	<p>Peralatan dan Mesin</p> <p>Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin yang mencakup antar lain: Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan di Air Bermotor, Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan Udara, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat-alat Ukur, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat-alat Persenjataan/Keamanan.</p>
133	<p>Gedung dan Bangunan</p> <p>Digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup antara lain: Gedung Kantor, Gedung Rumah Jabatan, Gedung Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Monumen, Tugu Peringatan.</p>
134	<p>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>Digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang mencakup antara lain: Jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, dan Instalasi Listrik dan Telepon.</p>





# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

135	Aset Tetap Lainnya Digunakan untuk mencatat kepemilikan Aset Tetap Lainnya yang mencakup antara lain: Buku dan Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan, Hewan/Ternak dan Tanaman.
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan Digunakan untuk mencatat aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
137	Akumulasi Penyusutan Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
14	Dana Cadangan Merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
141	Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat penyesihan dana untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15	Aset Lainnya Merupakan kelompok Aset yang tidak termasuk dalam kategori- kategori sebelumnya.
151	Tagihan Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat Tagihan Jangka Panjang pemerintah yang mencakup antara lain Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi.
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga Digunakan untuk mencatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang mencakup antara lain: Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO), dan Kerjasama Operasi (KSO).
153	Aset Tidak Berwujud Digunakan untuk mencatat Aset Tidak Berwujud yang mencakup antara lain goodwill, lisensi dan frenchise, hak cipta, paten, dan aset tidak berwujud lainnya.



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

154	Aset Lain-lain Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebelumnya.
19	RK SKPD Digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran SKPD.

#### b. Akun Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Klasifikasi dari akun Kewajiban disajikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Kodefikasi	Uraian Akun
2	Kewajiban
21	Kewajiban Jangka Pendek Merupakan kelompok kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Digunakan untuk mencatat utang yang disebabkan kedudukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya yang mencakup antara lain: Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
212	Utang Bunga Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup antara lain: Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga Kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Bunga dalam Negeri lainnya, dan Utang Bunga Luar Negeri.
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup antara lain: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, dan Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

214	Pendapatan Diterima Dimuka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka yang mencakup antara lain: Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak III, Uang Muka Penjualan, dan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.
215	Utang Beban Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Utang Beban mencakup antara lain: Utang Beban Pegawai, Utang Beban Barang, Utang Beban Bunga, Utang Beban Subsidi, Utang Beban Hibah, Utang Beban Lain-lain, dan Utang Beban Transfer.
216	Utang Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang di atas.
22	Kewajiban Jangka Panjang Merupakan kelompok kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
221	Utang Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup antara lain: Utang dari Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang dari Pemerintah Pusat, Utang dari Pemerintah Daerah lainnya, dan Premium
223	Utang Luar Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
224	Utang Jangka Panjang Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam klasifikasi di atas.



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Akun Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal laporan.

Klasifikasi Akun Ekuitas disajikan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kodefikasi	Uraian Akun
3	Ekuitas
31	Ekuitas Adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal laporan.
311	Ekuitas Adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
312	Ekuitas SAL SAL, yang mencakup antara lain Pendapatan, Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan dan Estimasi Perubahan SAL. Digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Akun Pendapatan, Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan digunakan apabila menerapkan akuntansi anggaran.
313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

#### 2. Akun Laporan Realisasi Anggaran

##### a. Akun Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan tidak perlu dibayar kembali

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Klasifikasi Akun Pendapatan-LRA disajikan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kodefikas	Uraian Akun
4	Pendapatan-LRA
41	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
411	Pendapatan Pajak Daerah-LRA Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan pajak daerah lainnya
412	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Digunakan untuk mencatat retribusi daerah, antara lain: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Digunakan untuk mencatat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain: Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN, dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGGU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

414	Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Digunakan untuk mencatat Lain-Lain PAD yang sah, antara lain: antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan
42	Pendapatan Transfer – LRA Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencakup antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU,
422	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
43	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.
431	Pendapatan Hibah Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari
432	Pendapatan Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lainnya selain Pendapatan Hibah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## b. Akun Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi akun belanja disajikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Kodefikasi	Uraian Akun
5	Belanja
51	Belanja Operasi Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.
511	Belanja Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang dibayarkan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai mencakup antara lain: Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, serta Belanja Pegawai BLUD (dari APBD).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

512	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Barang dan Jasa dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja perjalanan.</p> <p>Belanja Barang dan Jasa mencakup antara lain: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, dan pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait</p>
513	<p>Belanja bunga</p> <p>Akun Belanja Bunga digunakan untuk alokasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk belanja pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti biaya commitment fee dan biaya denda.</p> <p>Belanja Bunga mencakup antara lain Bunga Utang Pinjaman dan Bunga Utang Obligasi.</p>
514	<p>Belanja Subsidi</p> <p>Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada BUMN/BUMD atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.</p> <p>Belanja Subsidi mencakup antara lain: digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan barang/jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh</p>

515	<p>Belanja Hibah</p> <p>Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.</p> <p>Belanja Hibah mencakup antara lain: Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah, Belanja Hibah kepada Pemerintah</p>
516	<p>Belanja Bantuan Sosial</p> <p>Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupa uang atau barang serta jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kodefikasi	Uraian Akun
	Belanja Bantuan Sosial mencakup antara lain: Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Sosial kepada
52	<p>Belanja Modal</p> <p>Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh</p>
521	<p>Belanja Modal Tanah</p> <p>Akun Belanja Modal Pengadaan Tanah digunakan untuk alokasi belanja pengadaan tanah yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir).</p> <p>Belanja Modal Tanah mencakup pengadaan berbagai jenis tanah antara lain: Tanah Kantor, Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik, Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak, Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus, Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus, Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan, Tanah Sarana Sosial Panti Jompo, Tanah Sarana Umum Terminal, Tanah Sarana Umum Dermaga, Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis, Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan, Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan, Tanah Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Tanah Sarana Umum Taman, Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat, Tanah Sarana Umum Ibadah, Tanah Sarana Stadion Olahraga, Tanah Perumahan, Tanah Pertanian, Tanah</p>
522	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin digunakan untuk alokasi belanja pengadaan peralatan dan mesin yang akan</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir).</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencakup pengadaan berbagai jenis peralatan dan mesin antara lain: Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan di Air Bermotor, Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan Udara, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat-alat Ukur, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat-</p>
523	<p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk alokasi belanja pengadaan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir).</p> <p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencakup pengadaan berbagai gedung pemerintah daerah antara lain: Gedung Kantor Gedung Rumah Jabatan, Gedung Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Monumen, Tugu Peringatan, dan Gedung dan Bangunan BLUD.</p>
524	<p>Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>Akun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk alokasi belanja pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir).</p> <p>Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup pengadaan aset antara lain: Jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota, Instalasi Listrik &amp; Telepon, Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD.</p>
525	<p>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk alokasi belanja pengadaan yang nantinya akan menghasilkan Aset Tetap Lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir).</p> <p>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencakup antara lain: Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan,</p>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

53	<p><b>Belanja Tak Terduga</b></p> <p>Pengeluaran/belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.</p>
----	--

### Transfer-LRA

Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, transfer dapat diklasifikasikan ke dalam tabel berikut:

Kodefikasi	Uraian Akun
6	Transfer
61	<p>Transfer Bantuan Keuangan</p> <p>Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.</p>
611	<p>Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</p> <p>Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.</p>
612	<p>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</p> <p>Bantuan Keuangan yang diberikan di luar entitas pelaporan/pemerintahan seperti Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.</p>

### Surplus/Defisit

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode. Penghitungan Surplus/Defisit tidak diberikan kode akun tersendiri. Angka ini merupakan selisih lebih/kurang antara Total Pendapatan dikurangi dengan total belanja plus transfer [S/D =  $\sum \text{Pendapatan} - (\sum \text{Belanja} + \sum \text{Transfer})$ ].

### Akun Pembiayaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### 1) Akun Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit.

Akun Penerimaan Pembiayaan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diklasifikasikan sebagai berikut:

Kodefikasi	Uraian Akun
7	Pembiayaan
71	Penerimaan Pembiayaan Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit.
711	Penggunaan SILPA Digunakan untuk mencatat penggunaan SILPA dari tahun sebelumnya.
712	Pencairan Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat Pencairan Aset Dana Cadangan yang akan digunakan pada tahun berjalan.
713	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Digunakan untuk mencatat Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mencakup antara lain Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Penjualan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
714	Pinjaman Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat penerimaan Pinjaman Dalam Negeri yang mencakup antara lain: Pinjaman dari Pemerintah Pusat, Pinjaman dari Bank, Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Penerbitan Obligasi Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah Daerah lainnya.
715	Penerimaan Kembali Piutang Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Piutang yang mencakup antara lain Piutang kepada Perusahaan Negara, Piutang kepada Perusahaan Daerah, Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
716	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

### Akun Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Akun Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diklasifikasikan sebagai berikut:

Kodefikasi	Uraian Akun
7	Pembiayaan
72	Pengeluaran Pembiayaan Digunakan untuk mencatat alokasi pengeluaran pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran.
721	Pembentukan Dana Cadangan Digunakan untuk mencatat pembentukan dana cadangan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
722	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mencakup antara lain: Penyertaan Modal Pada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta termasuk investasi non permanen.
723	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri yang mencakup antara lain: Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pelunasan/pembelian kembali Obligasi Daerah.
724	Pemberian Pinjaman Daerah Digunakan untuk mencatat Pemberian Pinjaman Daerah yang mencakup antara lain Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, dan Pemerintah Daerah Lainnya.

### SILPA/SIKPA

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

### a. Akun Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Klasifikasi Akun Pendapatan-LO sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kodefikasi	Urai
8	Pendapatan-LO
81	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Merupakan Pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
811	Pendapatan Pajak Daerah-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan pajak-pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
812	Pendapatan Retribusi Daerah-LO Digunakan untuk mencatat retribusi daerah, antara lain: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Digunakan untuk mencatat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain: Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN, dan Bagian Laba atas

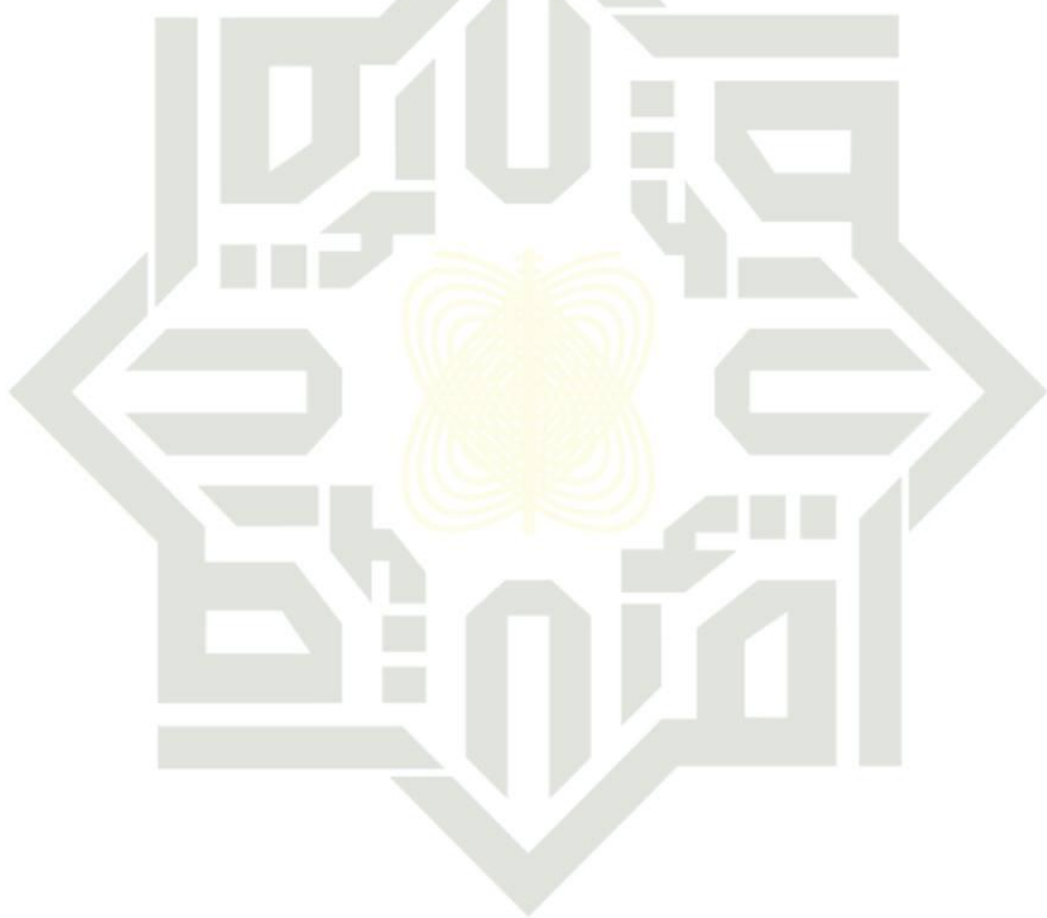


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kodefikasi	Uraian Akun
	Digunakan untuk mencatat Lain-Lain PAD yang sah, antara lain: Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Pendapatan Zakat, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan BLUD.
82	Pendapatan Transfer – LO Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.
821	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencakup antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK.
822	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya, antara lain Dana Penyesuaian, dan Dana Darurat.
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya, antara lain: Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.
83	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

831	<p><b>Pendapatan Hibah</b> Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain: Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan.</p>
832	<p><b>Pendapatan Lainnya</b> Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lainnya selain Pendapatan Hibah.</p>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kodefikasi	Uraian Akun
84	Pendapatan Non Operasional-LO Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Suprlus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
85	Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa digunakan untuk mencatat pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

### b. Akun Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Menurut SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Klasifikasi Akun Beban sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kodefikasi	Uraian Akun
9	Beban
91	Beban Operasi Merupakan beban berupa pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang memberi manfaat jangka pendek.
911	Beban Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang dibayarkan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai mencakup antara lain: Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kodefikasi	Uraian Akun
	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, dan Beban Pegawai BLUD (dari APBD).
912	<p>Beban Barang</p> <p>Akun Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.</p> <p>Beban Barang mencakup antara lain: Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS, dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.</p>
913	<p>Beban Bunga</p> <p>Akun Beban Bunga digunakan untuk alokasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya- biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti biaya commitment fee dan biaya denda.</p> <p>Beban Bunga mencakup antara lain Bunga Utang Pinjaman dan bunga Utang Obligasi.</p>
914	<p>Beban Subsidi</p> <p>Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada BUMN/BUMD atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat terjangkau masyarakat.</p> <p>Beban Subsidi mencakup antara lain: digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan barang/jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

915	<p>Beban Hibah</p> <p>Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.</p> <p>Beban Hibah mencakup antara lain: Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Masyarakat, Beban Hibah kepada Organisasi</p>
916	<p>Beban Bantuan Sosial</p> <p>Digunakan untuk mencatat transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam Beban Bantuan Sosial memenuhi kriteria sebagaimana Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Akuntansi Beban Bantuan Sosial. Beban Bantuan Sosial mencakup antara lain: Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok</p>
917	<p>Beban Penyusutan</p> <p>Digunakan untuk mencatat penyusutan atas aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Beban penyusutan mencakup antara lain: Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya,</p>
918	<p>Beban Penyisihan Piutang dan Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir</p> <p>Digunakan untuk mencatat beban cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang dan akun investasi nonpermanen-dana bergulir terkait pengembalian</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

919	<p>Beban Lain-lain</p> <p>Digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka</p>
-----	---

**c. Akun Beban Non Operasional**

Beban Non Operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin.

Kodefikasi	Uraian Akun
93	<p>Beban Non Operasional</p> <p>Non Operasional mencakup antara lain Defisit Penjualan Aset Nonlancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.</p>

**d. Akun Beban Luar Biasa**

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa.

Kodefikasi	Uraian Akun
94	<p>Beban Luar Biasa</p> <p>Digunakan untuk mencatat kejadian luar biasa, yakni kejadian yang: (1) tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; (2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; (3) kejadian diluar kendali Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.</p>

**e. Akun Perubahan SAL**

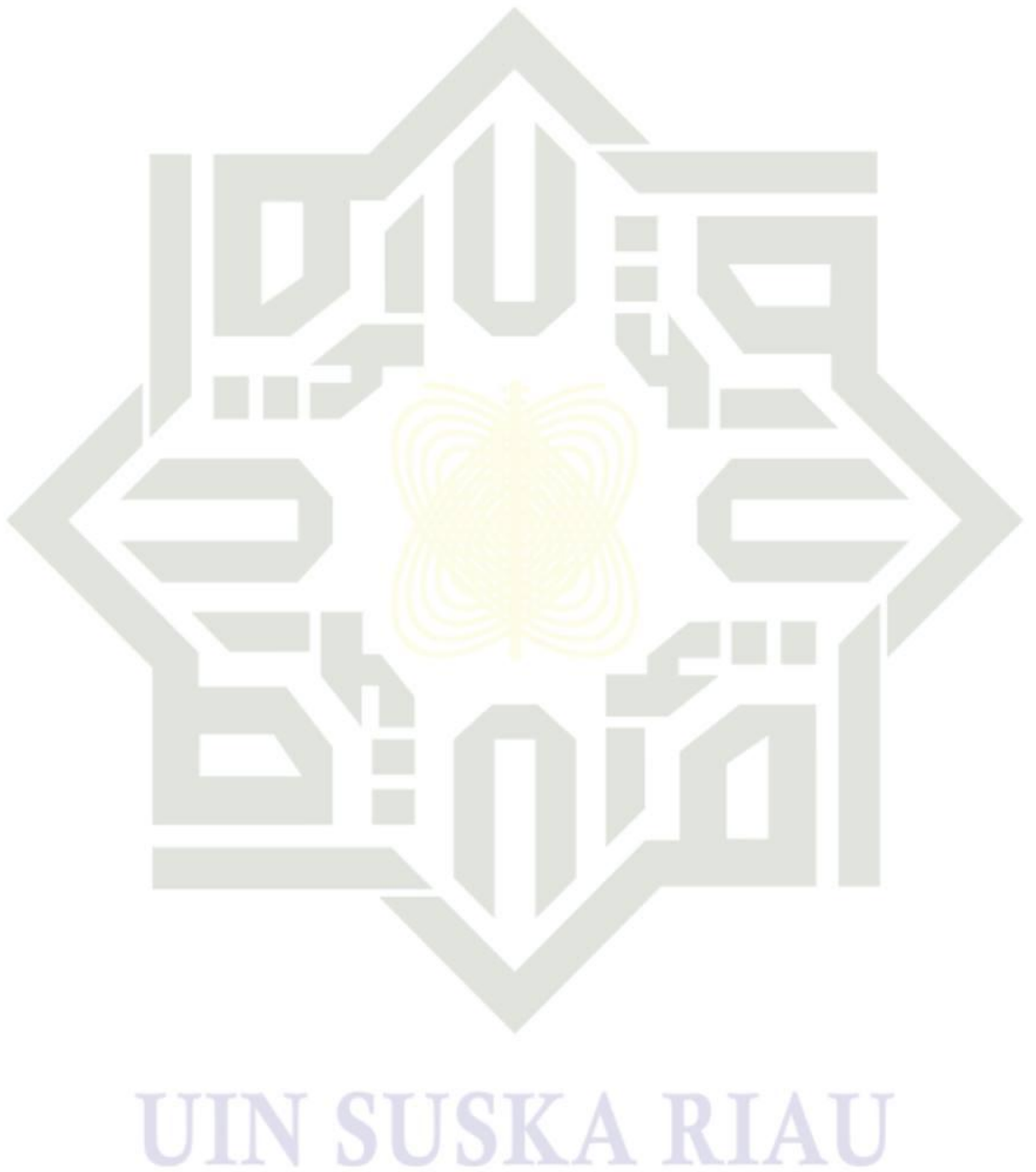
Akun antara Perubahan SAL adalah akun yang menjadi akun perantara atas transaksi Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kodefikasi	Uraian Akun
0.0.0.00.00	Perubahan SAL Digunakan untuk mencatat akun perantara atas transaksi Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.





BAB V PENJELASAN PENJELASAN AKUN LRA, LO, LPE DAN NERACA					
A. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
4. PENDAPATAN					
				Anggaran 2018	Realisasi 2018
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH				Rp 1.500.000.000,00	Rp 2.567.946.176,00
Realisasi pendapatan asli daerah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.567.946.176,00 RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang memiliki Target Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,00.-					
4.1.1. PENDAPATAN PAJAK DAEARH				Anggaran 2018	Realisasi 2018
LRA				Rp -	Rp -
Realisasi pendapatan Pajak daerah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00 RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Tidak memiliki Target Pendapatan Pajak LRA					
4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAEARH				Anggaran 2018	Realisasi 2018
LRA				Rp 1.500.000.000,00	Rp 2.567.946.176,00
Realisasi pendapatan Retribusi daerah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. Rp. 196.993.212,05.-					
4.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DARA H YANG DIPISAHKAN				Anggaran 2018	Realisasi 2018
				Rp -	Rp -
Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Tidak memiliki Target Pendapatan atas Pengelolaan Kekayaan Daerah LRA					
4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH				Anggaran 2018	Realisasi 2018
				Rp -	Rp

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	1	Realisasi Lain Lain pendapatan yang sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00 RSUD Tengku Sultan Pulang Kijang Tidak memiliki Target Pendapatan atas Lain lain Pendapatan Yang Sah		
	5	BELANJA		
	5	BELANJA OPERASI		
	5	BELANJA PEGAWAI	Anggaran 2018	Realisasi 2018
	1		Rp 1.883.313.338,00	Rp 1.573.755.137,00
		Belanja pegawai per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 1.573.755.137,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.883.313.338,00		
		Rincian Belanja Pegawai adalah Sebagai berikut :		
		URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
		Belanja Pegawai	1.883.313.338,00	1.573.755.137,00
		Gaji dan Tunjangan	1.113.405.213,00	995.805.137,00
		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	850.696.313,00	770.425.000,00
		Tunjangan Keluarga	88.366.196,00	83.886.348,00
		Tunjangan Jabatan	49.360.000,00	36.400.000,00
		Tunjangan Fungsional	38.045.438,00	33.670.000,00
		Tunjangan Fungsional Umum	23.462.250,00	14.000.000,00
		Tunjangan Beras	56.828.128,00	51.273.360,00
		Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	37.461,00	30.300,00
		Pembulatan Gaji	12.542,00	10.786,00
		Turan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.714.424,00	1.584.914,00
		Turan Jaminan Kematian (JKM)	4.882.461,00	4.524.429,00
		Tambahan Penghasilan PNS	769.908.125,00	577.950.000,00

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	528.708.125,00	478.950.000,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	18.000.000,00	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	223.200.000,00	99.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>1.883.313.338,00</b>	<b>1.573.755.137,00</b>
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>
		<b>Rp 4.971.497.600,00</b>	<b>Rp 4.975.281.132,00</b>
	Belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 4.975.281.132,00 dari anggaran sebesar Rp. 4.971.497,00 dengan Rincian Belanja Sebagai Berikut :		
	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>Belanja Barang dan jasa</b>	<b>4.971.497.600,00</b>	<b>4.975.281.132,00</b>
	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>225.105.000,00</b>	<b>225.099.000,00</b>
	Belanja Alat Tulis Kantor	26.905.000,00	26.905.000,00
	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	4.200.000,00	4.199.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.150.000,00	12.145.000,00
	Belanja Pengisian Tabung Gas	100.000.000,00	100.000.000,00
	Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00
	Belanja Bahan Pelumas	1.850.000,00	1.850.000,00
	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>104.873.600,00</b>	<b>101.691.061,00</b>
	Belanja Bahan Obat-obatan	103.073.600,00	99.891.061,00
	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>509.850.000,00</b>	<b>508.570.952,00</b>
	Belanja telepon	3.600.000,00	3.300.000,00

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Belanja listrik	42.000.000,00	41.020.952,00	
	Belanja kawat/faksimili/internet	6.400.000,00	6.400.000,00	
	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	
	Belanja Jasa Petugas Administrasi Perkantoran	70.500.000,00	70.500.000,00	
	Belanja Jasa Petugas Kesehatan	382.800.000,00	382.800.000,00	
	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	-	-	
	Belanja Jasa Service	-	-	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	-	
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	
	Belanja Cetak	5.500.000,00	5.500.000,00	
	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	
	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>161.000.000,00</b>	<b>161.000.000,00</b>	
	Belanja makanan dan minuman Pasien	72.000.000,00	72.000.000,00	
	Belanja makanan dan minuman kegiatan	89.000.000,00	89.000.000,00	
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>372.079.000,00</b>	<b>371.175.000,00</b>	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	372.079.000,00	371.175.000,00	
	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>199.400.000,00</b>	
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.400.000,00	
	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>275.000.000,00</b>	-	
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	
	Belanja Bimbingan Teknis	275.000.000,00	-	
	<b>Honorarium PNS</b>	<b>165.840.000,00</b>	<b>144.180.000,00</b>	

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
		Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
		Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)	240.000,00	240.000,00	
		Belanja Pegawai BLUD Rumah Rumah Sakit	164.400.000,00	142.740.000,00	
		<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.662.150.000,00</b>	<b>1.647.150.000,00</b>	
		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.620.000.000,00	1.605.000.000,00	
		Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	25.550.000,00	25.550.000,00	
		Honorarium Satuan Keamanan	11.700.000,00	11.700.000,00	
		Honorarium Pengemudi	4.900.000,00	4.900.000,00	
		<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>1.285.600.000,00</b>	<b>1.607.015.119,00</b>	
		Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.285.600.000,00	1.607.015.119,00	
5.1.		<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	
			Rp -	Rp -	
		Belanja hibah per 31 Desember 2018.terrealisasi .sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Tidak memiliki Belanja Hibah di tahun 2018			
5.1.		<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	
			Rp -	Rp -	
		Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2018.terrealisasi .sebesar Rp0,00dari anggaran sebesar Rp0,00 RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Tidak memiliki Belanja Bantuan Sosial di tahun 2018			
5.2		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		Rp 8.532.460.598,06	Rp 7.497.427.218,69	
		Belanja modal per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 7.497.427.218,69 dari anggaran sebesar Rp. 8.532.460.598,06 dengan rincian Belanja Modal Sebagai berikut :			
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.	1	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	
		Belanja Modal	8.532.460.598,06	7.497.427.218,69	
		Belanja Peralatan dan mesin	5.932.800.000,00	5.167.021.656,69	
		Belanja modal pengadaan komputer note book	22.800.000,00	21.900.000,00	
		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	5.910.000.000,00	5.145.121.656,69	
		Belanja Gedung dan Bangunan	2.549.660.598,06	2.287.764.562,00	
		Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantorr	2.549.660.598,06	2.287.764.562,00	
		Belanja Modal BLUD	50.000.000,00	42.641.000,00	
		Belanja modal BLUD Rumah Sakit	50.000.000,00	42.641.000,00	
5.2.1	1	<b>BELANJA MODAL TANAH</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	
			Rp -	Rp -	
5.2.1	1	Belanja modal tanah per 31 Desember 2018.terrealisasi .sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang ditahun 2018 Memiliki Belanja Modal Tanah			
5.2.1	1	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	
			Rp 5.932.800.000,00	Rp 5.167.021.656,69	

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 5.167.021,656,69 dari anggaran sebesar Rp. 5.932.800.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin berupa Belanja Komputer Notebook dan Alat-alat Kedokteran Umum.			
	<b>BELANJA MODAL GEDUNG</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	
	<b>DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
		<b>2.549.660.598,06</b>	<b>2.287.764.562,00</b>	
5.2.	Belanja modal Gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 2.287.764.562,00 dari anggaran sebesar Rp . 2.549.660.598,00 RSUD Tengku Sulung Pulau Kiang ditahun 2018 Tidak Memiliki Rehab bangunan			
	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	
	<b>DAN JARINGAN</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
		-	-	
5.2.	Belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 0,00.			
	<b>BELANJA MODAL ASET TETAP</b>	<b>Anggaran 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	
	<b>LAINNYA</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
		<b>50.000.000,00</b>	<b>42.641.000,00</b>	
5.2.	Belanja modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 42.641.000,00 dari anggaran sebesar Rp 50.000.000,00			

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2018

#### BAB VI

#### PENUTUP

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2018 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

##### A. Permasalahan

1. Peningkatan kemampuan SDM aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata Organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah.
2. Terbatasnya aparatur pengelolaan barang milik daerah mengakibatkan pengelolaan barang daerah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penuntasan aset belum berjalan baik sehingga masih ada aset yang tidak/ belum tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan.
4. Kurangnya koordinasi antar seksi sehingga sering terjadi perbedaan dan selisih perhitungan. yang menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan.
5. Penerapan Akuntansi Berbasis Acrual di tahun 2016 menyebabkan banyak terjadi perbedaan perbedaan dengan laporan tahun lalu.

##### B. Pemecahannya

1. Perlu ditingkatkan SDM aparatur khususnya di bidang kelembagaan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan agar terwujudnya postur organisasi yang efesien, efektivitas dan profesional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dan Diupayakan pembentukan jabatan fungsional yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
2. Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 17 Tahun 2004 kepada setiap pemegang barang dan pengurus barang dari setiap unit kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Diperlukan adanya suatu sistem penanganan pengelolaan barang melalui sistem manajemen pengelolaan barang daerah guna mengakomodir kegiatan pengelolaan barang daerah dengan menggunakan program aplikasi secara terstruktur dan terintegrasi sehingga memudahkan penanganan dan monitoring serta pengawasan. Setiap Pengadaan Barang/ Jasa hendaknya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memberikan laporan dan data kepada Pengurus dan Penyimpan Barang.
4. Kepada PPTK dan Staf membuat kontrol atas pertanggung jawaban yang dibuat untuk kesalahan dan selisih atau hilangnya berkas pertanggung jawaban dan lampirannya.



## BIOGRAFI PENULIS



**FITYAH NUR KUMALA**, Lahir di Pulau Kijang, Kabupaten Inhil pada 03 Maret 1998. Anak ke 2 dari 3 bersaudara. Lahir dari pasangan Ayahanda Zahid dan Ibunda Khosingah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin pada tahun 2009. Menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Hidayatul Mubtadiin pada tahun 2012 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin pada tahun 2015.

Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Jurusan Akuntansi untuk meraih gelar sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1) di tahun yang sama setelah lulus Madrasah Aliyah. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan Selanjutnya ditahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau.

Penulis melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan judul skripsi “ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) (Studi Kasus Pada RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang” pada hari Senin tanggal 04 November 2019 penulis dinyatakan “**Lulus**” ujian Sarjana dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.